



2025 LAPORAN KINERJA

**BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN**





AGRO MODERN



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website : <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 30 Januari 2026
Inspektur IV

drh. Pujo Harmadi, MP
NIP.19740523 200212 1 002

AGRO MODERN



AGRO MODERN



AGRO MODERN

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan LKj ini bertujuan untuk memberikan informasi capaian kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan/atau seharusnya dicapai, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam rangka mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan bagi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan laporan ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian, serta sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Substansi materi yang termuat dalam laporan ini, secara umum memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian selama Tahun 2025. Capaian Kinerja Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini digunakan sebagai umpan balik (*feed back*) perbaikan dan pengambilan keputusan strategis guna meningkatkan kualitas capaian kinerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian secara berkelanjutan.

Jakarta, Februari 2026
Kepala Badan


Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si., GRCE



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Organisasi.....	3
C. Tantangan dan Peran Strategis.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis Organisasi.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV.....	49
PENUTUP.....	51
LAMPIRAN.....	52

AGRO MODERN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BRMP 2025-2029	11
Tabel 2.	Target Kinerja BRMP Tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja.....	15
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja BRMP Tahun 2025.....	20
Tabel 4.	Parameter Pengukuran Sasaran Program Reformasi Birokrasi.....	28
Tabel 5.	Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target BRMP 2023-2025	29
Tabel 6.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi dengan Target Jangka Menengah.....	30
Tabel 7.	SNI yang ditetapkan dari usulan BRMP Tahun 2025.....	34
Tabel 8.	Capaian Produksi Benih Sumber Tahun 2025.....	35
Tabel 9.	Sebaran Anggaran per Program s.d Level Output TA 2025	43
Tabel 10.	Realisasi Anggaran BRMP per Program/Kegiatan Tahun 2025 berdasarkan Anggaran Total	45
Tabel 11.	Realisasi Anggaran BRMP per Program/Kegiatan Tahun 2025 berdasarkan Pagu Efektif	45
Tabel 12.	Realisasi Anggaran Lingkup BRMP per Output Tahun 2025 berdasarkan Pagu Efektif	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.....	4
Gambar 2.	Profil Pegawai BRMP Tahun 2025	5
Gambar 3.	Visi dan Misi BRMP	9
Gambar 4.	Arah Kebijakan dan Strategi BRMP	13
Gambar 5.	Distribusi Jumlah Kecamatan Sampel Survei Petani per Provinsi	25
Gambar 6.	Nilai Efisiensi Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK BRMP Tahun 2025 ...	33
Gambar 7.	Anggaran BRMP TA 2025 per Jenis Belanja.....	42
Gambar 9.	Grafik Alokasi Anggaran Tahun 2023-2025.....	42
Gambar 8.	Grafik Persentase Realisasi Anggaran BRMP TA 2025.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi BRMP Tahun 2025	53
Lampiran 2.	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian UK Tahun 2025	54
Lampiran 3.	Nama dan Lokasi Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP)	55
Lampiran 4.	Nama dan Lokasi Laboratorium	59
Lampiran 5.	Pohon Kinerja BRMP	63
Lampiran 6.	Perjanjian Kinerja BRMP 2025.....	64
Lampiran 7.	Keputusan Kepala BRMP tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mandiri Lingkup BRMP Tahun 2025.....	65
Lampiran 8.	Manual IKU BRMP	69
Lampiran 9.	SOP Pengumpulan Data, SOP Penyiapan Bahan LKj, dan SOP Penyusunan LKj.....	79
Lampiran 10.	Daftar Usaha Tani Binaan Lingkup BRMP 2025	82
Lampiran 11.	Sebaran Penggunaan SBK pada Satker Lingkup BRMP 2025	95
Lampiran 12.	Rekap Nilai Efisiensi Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.....	98
Lampiran 13.	Rekap Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BRMP TA 2025 per tanggal 24 Januari 2026.....	100

AGRO MODERN



AGRO MODERN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 disusun sebagai bentuk kepatuhan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025.

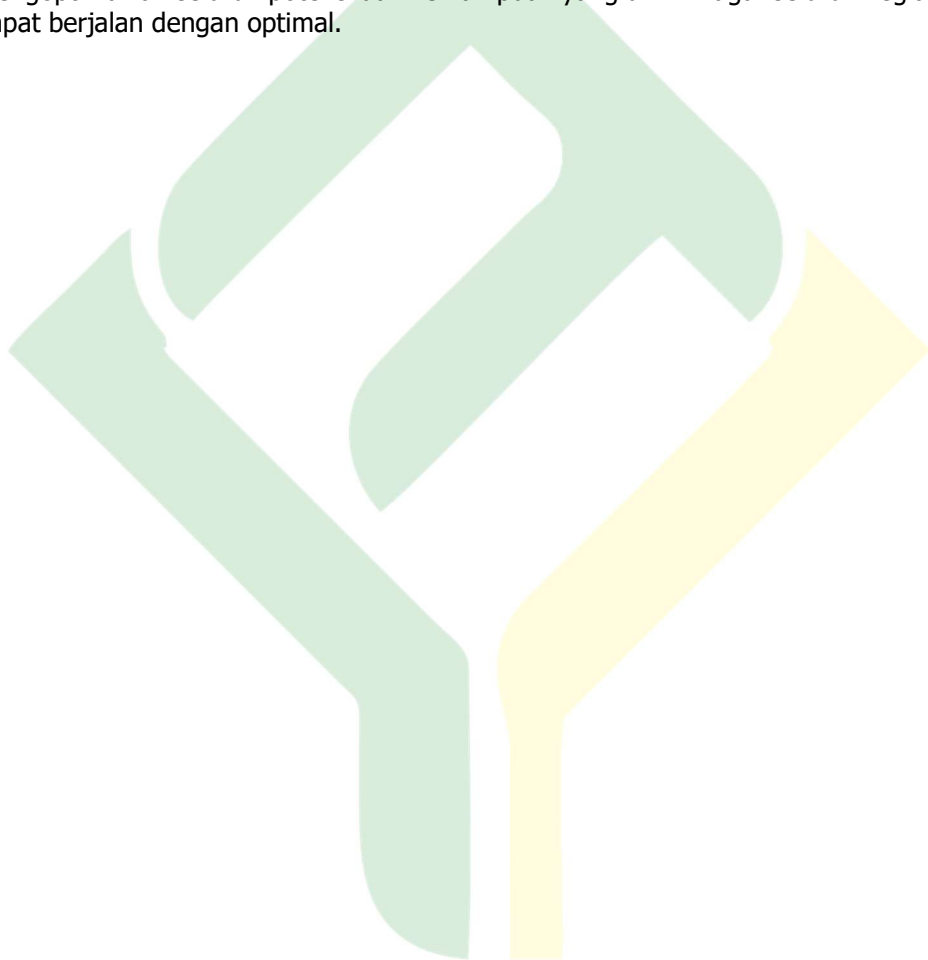
Laporan Kinerja ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2025, baik keberhasilan yang diraih maupun permasalahan yang memerlukan perbaikan ke depan. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pertanian, serta Permentan Nomor 10 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur OTK Unit Pelaksana Teknis BRMP, dengan mandat strategis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, penyebarluasan, dan penerapan pertanian modern. Dalam melaksanakan kegiatannya, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Pertanian diantaranya dijelaskan dalam 3 program Kementerian Pertanian yaitu: 1) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, 2) Program nilai tambah dan daya saing industri, dan 3) Program dukungan manajemen. Visi utama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yaitu **"Mewujudkan lembaga unggul dan berdaya saing global dalam perekayasaan dan modernisasi teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mendukung pertanian maju Indonesia"**.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Kementerian Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melalui Perjanjian Kinerja mempunyai 4 (empat) sasaran program dan 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan sebagai parameter pengukuran realisasi capaian setiap sasaran, yaitu (1) Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi, (2) Persentase pelaku usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, (3) Indeks pelestarian sumber daya genetik tanaman pertanian, dan 4) Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Target untuk 4 indikator kinerja utama telah dipenuhi, secara keseluruhan rata-rata capaian berhasil (105,89%) atau dapat dikategorikan sangat berhasil. Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan tahun anggaran 2025 per 23 Januari 2026 (sumber data OM SPAN), anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (berdasarkan pagu efektif) telah direalisasikan sebesar 97,61%. Adapun capaian fisik masing-masing indikator

kinerja berkisar antara 95,71% - 117%. Secara keseluruhan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian memiliki nilai efisiensi SBK sebesar 98,50%.

Walau secara umum target yang ditetapkan telah terpenuhi, namun dalam pelaksanaan kegiatan tidaklah selalu berjalan mulus. Masih banyak kendala teknis maupun non teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Namun, agar sasaran tetap tercapai, langkah antisipatif telah diupayakan oleh seluruh jajaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan optimal.



AGRO MODERN

BAB I

PENDAHULUAN





AGRO MODERN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BRMP. Akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) BRMP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja BRMP yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran serta capaian kinerja lainnya yang berhasil dicapai oleh BRMP pada tahun 2025, yang selanjutnya dapat dipublikasikan ke masyarakat.

Penyusunan LKj BRMP Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada: 1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta 3) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian.

B. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Organisasi

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) adalah salah satu unit kerja eselon 1 Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pembentukan BRMP ini merupakan hasil transformasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang sebelumnya juga merupakan kelanjutan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).

BRMP hadir menjadi tonggak penting dalam reformasi kelembagaan sektor pertanian yang mengedepankan inovasi dan modernisasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pertanian, Permentan Nomor 10 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur OTK Unit Pelaksana Teknis BRMP sebagaimana telah diubah dengan Permentan 37 Tahun 2025 dan Permentan 39 Tahun 2025 tentang perubahan Kedua atas Permentan 10 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan atas Permentan 10 Tahun tidak mengakibatkan perubahan pada tugas dan fungsi unit eselon I BRMP. Dengan mandat strategis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, penyebarluasan, dan penerapan pertanian modern, BRMP hadir sebagai motor penggerak dalam transformasi pertanian nasional menuju sistem yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. BRMP mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BRMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Gambar 1. Fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Secara organisasi, BRMP didukung oleh struktur unit kerja yang saling bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Struktur organisasi BRMP dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program, memperkuat koordinasi internal dan eksternal, serta memastikan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan organisasi. Kelembagaan BRMP berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pertanian yang terdiri dari: 1. Sekretariat Badan, 2. Empat Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang, BRMP memiliki 63 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2025 yang dapat dilihat pada Lampiran 1.

Struktur kelembagaan BRMP kemudian mengalami perubahan dengan pembentukan lima UPT lingkup BRMP Penerapan berupa dua Balai Penerapan Modernisasi Pertanian di Kalimantan Utara dan Papua Selatan serta tiga Loka Penerapan Modernisasi Pertanian di Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Penambahan UPT tersebut tercantum dalam Permentan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP. Seiring kebutuhan kelembagaan untuk

mendukung program strategis pembangunan pertanian, dilakukan peningkatan kelas UPT Balai Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 Provinsi menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Peningkatan kelas UPT tersebut diatur dalam Permentan 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua, atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP, berupa peningkatan eselon 33 balai penerapan menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, sehingga secara keseluruhan BRMP memiliki 69 Satker.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BRMP didukung oleh sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang bidang kepakaran (fungsional), serta didukung oleh pegawai teknis dan administratif. Saat ini, BRMP memiliki pegawai sebanyak 6.098 orang, rincian sebaran pegawai berdasarkan status kepegawaian per Unit Kerja disajikan dan pada Lampiran 2 dengan profil sebagai berikut:



Gambar 2. Profil Pegawai BRMP Tahun 2025

Selain didukung oleh SDM, BRMP juga didukung oleh sarana prasarana yang cukup memadai diantaranya berupa Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) dan Laboratorium pengujian. Sampai dengan akhir Desember 2025 BRMP tercatat memiliki 134 IP2MP dan 162 Laboratorium yang tersebar di satuan kerja lingkup BRMP. Rincian Nama IP2MP dan Laboratorium beserta lokasinya dapat dilihat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4.

C. Tantangan dan Peran Strategis

Dalam dinamika pembangunan pertanian nasional, BRMP menghadapi tantangan strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kelembagaan. Tantangan tersebut meliputi tuntutan percepatan peningkatan produktivitas dan daya saing pertanian, adaptasi terhadap perubahan iklim dan keragaman agroekologi, serta kebutuhan peningkatan adopsi teknologi modern, digital, dan *smart farming* oleh pelaku usaha pertanian. Di sisi internal, BRMP juga dihadapkan pada dinamika perubahan kelembagaan sebagai bagian dari transformasi organisasi Kementerian Pertanian, yang menuntut kejelasan peran, penguatan tata kelola, serta

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur agar mampu menjalankan mandat secara efektif dan akuntabel.

BRMP memiliki peran strategis sebagai pengungkit pencapaian visi dan misi Kementerian Pertanian melalui penguatan perakitan dan modernisasi teknologi pertanian terapan. BRMP berperan dalam memastikan bahwa inovasi dan teknologi pertanian yang dirakit, diuji, dan dapat diterapkan secara spesifik lokasi, terstandar, dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, nilai tambah, serta daya saing sektor pertanian. Selaras dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian, BRMP juga berperan dalam mendukung penguatan kelembagaan usaha tani, pemanfaatan teknologi digital dan modern, pelestarian sumber daya genetik tanaman pertanian, serta peningkatan tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel. Melalui peran strategis tersebut, BRMP diharapkan mampu beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan kelembagaan sekaligus menjadi motor penggerak modernisasi pertanian nasional yang berdampak nyata bagi pencapaian sasaran pembangunan pertanian.



AGRO MODERN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





AGRO MODERN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah unit organisasi yang disusun sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Renstra Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) disusun untuk periode lima tahun. Renstra BRMP Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan selama periode perencanaan 2025-2029. Visi BRMP dalam mendukung visi Kementerian Pertanian adalah:



Gambar 3. Visi dan Misi BRMP

Sebagai penjabaran dari visi dan misi BRMP, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pertanian nasional melalui penguatan penerapan standar teknis dan penilaian kesesuaian guna memperkuat posisi pelaku usaha tani di pasar domestik maupun internasional.
2. Mewujudkan modernisasi pertanian melalui inovasi teknologi digital dan percepatan hilirisasi mengakselerasi produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui pengembangan teknologi *smart farming* dan sistem pertanian modern, serta memastikan pemanfaatan hasil perekayasa secara luas melalui diseminasi dan kemitraan strategis guna mendukung swasembada pangan.

Sasaran Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian disusun berdasarkan tujuan dan *outcome* akhir (*final outcome*) yang ingin dicapai, merupakan *Critical Success Factor* (CSF) atas *outcome* akhir (*final outcome*) yang ingin dicapai. Kementerian Pertanian telah menyusun enam *final outcome*. Dari keenam *final outcome* tersebut BRMP secara langsung BRMP mendukung tiga *final outcome* yaitu:

- 1) *Final Outcome* ke-1 (FO.1) adalah meningkatnya kesejahteraan petani, dengan indikator kinerja IK.1 Indeks Kesejahteraan Petani. CSF dalam mewujudkan FO.1 ini adalah Intermediate Outcome (Int.O) 1.1, yaitu meningkatnya pendapatan petani, dengan 2 (dua) indikator kinerja, meliputi *intermediate outcome*: (1) Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP), dan (2) Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Penerapan standar dalam usahatani berbadan hukum adalah sebagai katalis untuk menghasilkan produk bernilai tambah dan memiliki daya saing tinggi. Dengan menerapkan standar tertentu, misalnya *Good Agricultural Practices* (GAP) atau penerapan standar lainnya, petani dapat beralih ke pola budidaya yang lebih efisien, terukur, dan ramah lingkungan. Hal tersebut secara langsung dapat mengurangi pemborosan input produksi. Kepatuhan terhadap standar ini dapat menembus rantai pasok modern dan pasar ekspor yang memiliki persayarakat ketat, sehingga petani diharapkan dapat memperoleh margin keuntungan yang lebih besar. Pengakuan terhadap penerapan standar badan usahatani berbadan hukum menjadi alat ukur BRMP untuk menilai modernisasi pertanian. Hal tersebut diimplementasikan dalam sasaran program meningkatnya sertifikasi usahatani nasional.

- 2) *Final outcome ke 2* yang ingin diwujudkan dalam pembangunan pertanian adalah kemandirian pangan asal pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 2 adalah IK.2.a: Indeks swasembada pangan prioritas, IK 2.b: Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan IK 2.c:

Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian, IK 2.d: Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian.

Kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan merupakan kemampuan sebagian besar kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari produksi pangan dalam negeri. Terhadap swasembada ini, BRMP mendukung melalui perakitan teknologi terapan dan penyebaran/diseminasi teknologi tersebut sehingga dengan sasaran meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Indikator sasaran tersebut adalah Persentase pelaku usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (%).

- 3) *Final Outcome* ke-6 (FO.6) yang ingin diwujudkan adalah Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja (IK) 6 Persentase Peningkatan Nilai RB Kementerian Pertanian. Sasaran BRMP dalam rangka mendukung *Final Outcome* ini adalah Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel dengan indikator Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Indeks).

Ketiga *Final Outcome* tersebut di atas dapat digambarkan pada pohon kinerja yang dapat dilihat pada Lampiran 5. Berdasarkan tugas dan fungsinya, pada periode 2025-2029 BRMP mendukung tiga program Kementerian Pertanian. Program yang didukung yaitu 1) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, 2) Program nilai tambah dan daya saing industri, dan 3) Program dukungan manajemen dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BRMP 2025-2029

Kode	Sasaran Program	Kode	Indikator Kinerja Program	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
<i>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (EC)</i>								
SP.1	Meningkatnya sertifikasi Usahatani Nasional	IKP.1	Persentase Usahatani Berbadan Hukum Yang Tersertifikat	13,07	28,76	30,72	53,59	54,90
<i>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (HA)</i>								
SP.2	Terwujudnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian	IKP.2	Indeks pelestarian sumber daya genetik pertanian (Indeks)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
SP.3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	IKP.3	Persentase Pelaku Usaha Pertanian Yang Memanfaatkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan	44,15	44,50	44,75	45,00	45,25

Kode	Sasaran Program	Kode	Indikator Kinerja Program	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
<i>Program Dukungan Manajemen (WA)</i>								
SP.4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Baik, Transparan dan Akuntabel	IKP.4	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	0,8	0,8005	0,801	0,8015	0,802

Arah Kebijakan dan Strategi

Pada periode 2025–2029, Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan yang sejalan dengan RPJMN untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Salah satu fokus utamanya adalah mewujudkan swasembada pangan agar ketersediaan pangan nasional terjamin dan sektor pertanian semakin berdaya saing. Dalam kerangka ini, swasembada pangan menjadi prioritas strategis pembangunan pertanian. Sebagai bagian dari Kementerian Pertanian, BRMP memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesiapan sektor pertanian Indonesia untuk bersaing di tengah tantangan global melalui perakitan dan modernisasi pertanian.

Dalam mendukung perekonomian nasional, peran BRMP sangat strategis, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan agroindustri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk pertanian. Modernisasi pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada efisiensi usaha melalui penurunan biaya produksi, perluasan akses pasar, serta peningkatan efektivitas dan keadilan dalam perdagangan, baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Selain itu, modernisasi pertanian membuka peluang baru yang berdampak positif bagi pelaku industri, seperti percepatan proses adopsi inovasi, peningkatan keamanan dan mutu produk, pengelolaan risiko usaha, keberlanjutan lingkungan, efisiensi energi, hingga penguatan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, BRMP berperan menyediakan layanan dan fasilitas yang menjamin konsistensi mutu, kompetensi, serta keberterimaan produk pertanian Indonesia di pasar ekspor. Peran tersebut menjadi nilai tambah dan posisi tawar BRMP, baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus memastikan hasil perakitan dan modernisasi pertanian dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Dalam upaya mewujudkan visi Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, BRMP menjadi penopang utama dalam pemanfaatan teknologi pertanian modern. Pemanfaatan teknologi pertanian modern merupakan proses penerapan inovasi dan peralatan modern dalam aktivitas pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, mutu hasil, dan keberlanjutan usaha tani. Hal ini diterjemahkan dalam **arah kebijakan BRMP** yang mencakup:



Gambar 4. Arah Kebijakan dan Strategi BRMP

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, diharapkan dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada Tahun 2025, BRMP telah menyusun dokumen PK dan mengalami tiga kali perubahan. PK awal ditandatangani Desember 2024, revisi I ditandatangani pada Mei 2025, dan revisi II ditandatangani pada September 2025, dan revisi III ditandatangani pada Desember 2025. Penyesuaian PK BRMP dilakukan atas dasar sebagai berikut:

1. Revisi I, Mei 2025, PK disusun akibat adanya perubahan Organisasi/Kelembagaan BSIP menjadi BRMP. Sasaran dan Indikator menggunakan sasaran dan indikator baru sesuai dengan BRMP. Perubahan Nomenklatur Eselon I, Sasaran Program dan Indikator Program.
2. Revisi II, September 2025, PK disusun sebagai akibat dari adanya pergeseran anggaran dari program Dukungan Manajemen (Dukman) ke Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (KAKPB) untuk pemenuhan kebutuhan produksi benih sumber komoditas strategis. Selain itu, terdapat penambahan anggaran pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (NTDSI) akibat perubahan target penerimaan PNBP. Perubahan anggaran pada program Dukman semula Rp745.010.182.000,00 menjadi Rp735.488.635.000,00; pada Program KAKPB semula Rp36.470.000.000,00 menjadi Rp47.015.422.000,00; dan pada Program NTDSI semula Rp147.558.197.000,00 menjadi Rp149.364.754.000,00.
3. Revisi III, Desember 2025, PK disusun untuk melakukan penyesuaian Sasaran, Indikator, dan Target berdasarkan draf Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 dan adanya perubahan anggaran akibat pencatatan anggaran yang bersumber dari penerimaan Hibah Langsung dalam dan Luar Negeri, rincian Hibah dapat dilihat pada lampiran 6. Perubahan Sasaran Program, Indikator Program dan target serta anggaran.

Revisi PK dilakukan sesuai dengan tata cara revisi PK yang termuat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Lampiran I mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Lampiran I, Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat, 2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran), serta 3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja maka ditetapkan target kinerja Kementerian Pertanian yang termuat pada PK Tahun 2025 (Lampiran 6) dan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Target Kinerja BRMP Tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Sertifikasi Usahatani Nasional	1.1 Persentase Usahatani Berbadan Hukum Yang Tersertifikat	13,07	%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	2.1 Persentase Pelaku Usaha Pertanian Yang Memanfaatkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan	44,15	%
3	Terwujudnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian	3.1 Indeks Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian	4,00	Skala (1-4)
4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Baik, Transparan dan Akuntabel	4.1 Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	0,8000	Indeks (0-1)

Sumber: PK BRMP, 2025

AGRO MODERN



AGRO MODERN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





AGRO MODERN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merujuk pada tanggung jawab instansi dalam mencapai tujuan dan target strategis yang ditetapkan, serta dijadikan acuan untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah diidentifikasi untuk mencapai visi dan misi organisasi. Kinerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, melalui metode *scoring*, yaitu:

1. Sangat berhasil : untuk capaian kinerja lebih besar dari 100%
2. Berhasil : untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100
3. Cukup berhasil : untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan kurang dari 80%
4. Kurang berhasil : untuk capaian kinerja kurang dari 60%

Capaian kinerja BRMP tidak hanya menampilkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga dilakukan evaluasi dan analisis perbandingan pencapaian kinerja tahun 2025 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2025. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja BRMP sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

Perjanjian Kinerja BRMP Tahun 2025 memiliki empat Sasaran Program dan enam Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian empat indikator kinerja tersebut diukur melalui jenis target atau polarisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja BRMP Tahun 2025, seluruhnya menggunakan jenis polarisasi *maximize target*, dimana pada polarisasi *maximize*, apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU adalah dengan membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120
2. Angka minimum adalah 0

Penetapan ini dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat. Pencapaian kinerja BRMP tahun 2025 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja BRMP Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Sertifikasi Usahatani Nasional	1.1 Persentase Usahatani Berbadan Hukum Yang Tersertifikat (%)	13,07	14,49	110,86	Sangat berhasil
2	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	2.1 Persetanse Pelaku Usaha Pertanian Yang Memanfaatkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan (%)	44,15	42,26	95,71	Berhasil
3	Terwujudnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian	3.1 Indeks Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian (Skala (1-4))	4,00	4,00	100	Berhasil
4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Baik, Transparan dan Akuntabel	4.1 Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Indeks (0-1))	0,8000	0,936	117	Sangat berhasil
Nilai Rata-Rata					105,89	Sangat berhasil

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 3, dapat dikatakan pencapaian kinerja BRMP masuk dalam kategori **"Sangat berhasil"**. Hal ini ditunjukkan melalui nilai rata-rata capaian sebesar 105,89%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja disebabkan oleh faktor pengawalan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan mendukung tugas dan fungsi BRMP, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Kegiatan pengawalan ini dilegalkan dalam Keputusan Kepala BRMP Nomor 972/Kpts/RC.050/H.08/2025 tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mandiri Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025, seperti terlihat pada Lampiran 7. Perhitungan IKU mengacu pada draf manual IKU BRMP seperti pada Lampiran 8. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga didorong oleh dukungan manajemen fasilitasi perakitan dan modernisasi pertanian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana prasarana.

Monitoring dan evaluasi realisasi capaian PK secara online telah difasilitasi oleh Setjen Kementan dan mulai dilaksanakan sejak tahun 2015. Tahun 2024 sejak awal BRMP melakukan monev rutin terhadap perkembangan capaian PK melalui rencana aksi AKIP yang diakomodir juga melalui aplikasi e-SAKIP. Pelaksanaan monev dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap IKU yang tercantum di dalam PK dan target kegiatan per komponen. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau capaian kinerja setiap bulan ataupun triwulanan serta kendala yang dihadapi. Sehingga dengan dilakukannya pemantauan secara periodik dan apabila terdapat indikator yang targetnya terindikasi tidak tercapai, dapat diantisipasi sejak awal. Matriks renaksi AKIP dapat dilihat pada Lampiran 9, SOP Pengumpulan Data, SOP Penyiapan Bahan LKj, dan SOP Penyusunan LKj dapat dilihat pada Lampiran 10. Capaian empat Indikator Kinerja BRMP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. IKP.1 Persentase Usahatani Berbadan Hukum Yang Tersertifikat (%)
Capaian IKP.1 dihitung dari usulan usaha tani berbadan hukum yang telah memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit eselon II teknis di lingkungan BRMP, sesuai dengan karakteristik dan lingkup pembinaan yang dilaksanakan.
2. IKP.2 Persetanse Pelaku Usaha Pertanian Yang Memanfaatkan Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan (%)
Capaian IKP.2 dihitung dengan mengukur tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital, *smart farming*, dan teknologi modern oleh pelaku usaha pertanian pada berbagai tahapan usaha tani, mulai dari penyiapan sarana-prasarana produksi (PSP), budidaya, panen-pascapanen, pengolahan, hingga pemasaran.
3. IKP.3 Indeks Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian (Skala (1-4))
Capaian IKP.3 dihitung dengan mengevaluasi keberhasilan upaya pelestarian SDG pertanian, untuk memastikan ketersediaan materi genetik yang dibutuhkan, misalnya untuk pemuliaan tanaman terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, hama dan penyakit baru, serta kebutuhan pangan global yang terus meningkat.
4. IKP.4 Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Indeks (0-1))
Capaian IKP.4 Indeks Tata Kelola Birokrasi BRMP adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di lingkungan BRMP. Indeks ini menilai sejauh mana proses birokrasi di BRMP telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, berintegritas, serta akuntabel sesuai prinsip *good governance* dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan

SP.1

Meningkatnya Sertifikasi Usaha Tani Nasional

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran "meningkatnya Sertifikasi Usaha Tani Nasional" diperoleh melalui indikator kinerja Persentase Usaha Tani Berbadan Hukum yang Tersertifikasi. Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan dengan mengukur proporsi atau jumlah pelaku usaha di bidang pertanian (petani, kelompok tani, gapoktan, KEP, UMKM, perusahaan rintisan, atau korporasi lainnya) berbadan hukum yang tersertifikasi dari total populasi usaha pertanian binaan BRMP pada tahun berjalan.

Sertifikasi yang dimaksud merupakan pengakuan/penghargaan dari Kepala BRMP atas diterapkannya standar sesuai kriteria seperti penerapan SNI produk, jasa, maupun proses, serta Bina UMKM; sertifikasi halal; sertifikasi benih dan kecukupan, SOP, GFP, GHP, GMP, dan penghargaan dari stakeholder lainnya. Pelaku usaha tani yang berbadan hukum adalah semua pelaku usaha maupun para pemangku kepentingan terkait yang memiliki ijin usaha atau terdaftar dalam SIMLUHTAN atau basis data Kementerian terkait. Jumlah usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKP\ 1 = \frac{\text{Jumlah Usahatani Berbadan Hukum yang Tersertifikasi}}{\text{Total Populasi Usahatani Berbadan Hukum Binaan BRMP pada Tahun Berjalan}} \times 100$$

Pencapaian indikator kinerja program 1 telah berhasil dilaksanakan melalui:

1. Pengambilan data jumlah usaha tani berbadan hukum binaan BRMP pada tahun berjalan
2. Pengambilan data jumlah usaha tani berbadan hukum binaan BRMP yang telah menerima sertifikat atau tanda sertifikasi yang diterbitkan oleh Kepala BRMP
3. Hitung persentase usaha tani yang berbadan hukum yang tersertifikasi

SP. 1 IKP.1	
Persentase Usaha Tani Berbadan Hukum Yang Tersertifikasi	
Target 13,07 %	Realisasi 14,49 %
Capaian 110,86 % (Sangat berhasil)	

Perhitungan realisasi:

$$IKP\ 1 = \frac{10}{69} \times 100 = 14,49 \%$$

Perhitungan capaian:

$$IKP 1 = \frac{14,49}{13,07} \times 100 = 110,86\%$$

Perhitungan data indikator kinerja program 1 berupa persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi berasal dari jumlah usaha tani binaan BRMP yang telah memenuhi kriteria yang telah disepakati dalam pengukuran. Pada tahun 2025 usulan diperoleh dari BRMP Perkebunan dan BRMP Penerapan seperti pada Lampiran 10. Berikut nama 10 usaha tani binaan yang memperoleh sertifikat adalah:

1. Gabungan Kelompok Tani Sungai Talang Makmur
2. Kilang Padi Siputri
3. Kelompok Tani "Jang Jaya"
4. Nata de Coco "Salju"
5. Koperasi Anugerah Aren Banten Nusantara
6. Koperasi Produsen Sukma Melati Hutabohu
7. Budidaya dan Pasca panen Pala Organik
8. Koperasi Produksi Petani Berkah Sejahtera
9. CV. Magna Jaya (Merk olahan biji kopi Bajawa "Sombra Coffee")
10. Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama

SP.2

Meningkatnya pemanfaatan teknologi *digital, smart farming, dan modern* dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan teknologi digital, *smart farming*, dan modern oleh pelaku usaha pertanian pada berbagai tahapan usaha tani, mulai dari penyiapan prasarana dan sarana produksi (PSP), budidaya, panen–pascapanen, pengolahan, hingga pemasaran pertanian. Teknologi yang dimaksud mencakup 4 ruang lingkup yaitu:

1. Varietas/ Galur Unggul
2. Alat dan Mesin Pertanian Modern
3. Sistem Informasi Pertanian
4. Teknologi Pertanian Modern

Varietas/Galur Unggul yang dimaksud adalah benih/bibit tanaman maupun ternak yang telah dilepas secara resmi oleh Kementerian Pertanian. Alat dan Mesin Pertanian modern yang dimaksud adalah peralatan mekanisasi pertanian yang pengoperasiannya menggunakan sumber tenaga mesin (diesel, bensin atau listrik). Sistem Informasi Pertanian yang dimaksud adalah aplikasi, *platform digital*, atau sistem berbasis TIK yang dapat memuat informasi penting bagi pelaksanaan kegiatan pertanian, misalnya informasi cuaca dan iklim, kalender tanam, rekomendasi pemupukan, informasi harga dan pasar, *traceability*, serta sistem manajemen usaha

tani, termasuk juga sistem informasi pendukung pemasaran. Teknologi Pertanian Modern yang dimaksud adalah teknologi sensor, *artificial intelligence*, *Internet of Things* (IoT), drone, otomatisasi irigasi, *precision agriculture*, teknologi pascapanen dan pengolahan modern. Selanjutnya seorang pelaku usaha pertanian dinyatakan "memanfaatkan teknologi" apabila: menggunakan minimal satu teknologi dari ruang lingkup (1) dan (2) dan minimal satu teknologi dari ruang lingkup (3) atau (4). Indikator ini dihitung dengan menggunakan formula:

$$= \frac{\text{Jumlah Usahatani yang Memanfaatkan Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian}}{\text{Total Pelaku Usahatani}} \times 100$$

*sampling

$$= \frac{393 \text{ Petani yang menggunakan minimal 2 Teknologi dengan salah satunya SIP atau pertanian modern}}{930 \text{ Responden petani di 34 Provinsi}} \times 100 = 42,26\%$$

Dimana:

%PUT : Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Memanfaatkan Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern

ΣPUT : Jumlah Sampel Pelaku Usaha Pertanian yang Memanfaatkan Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern

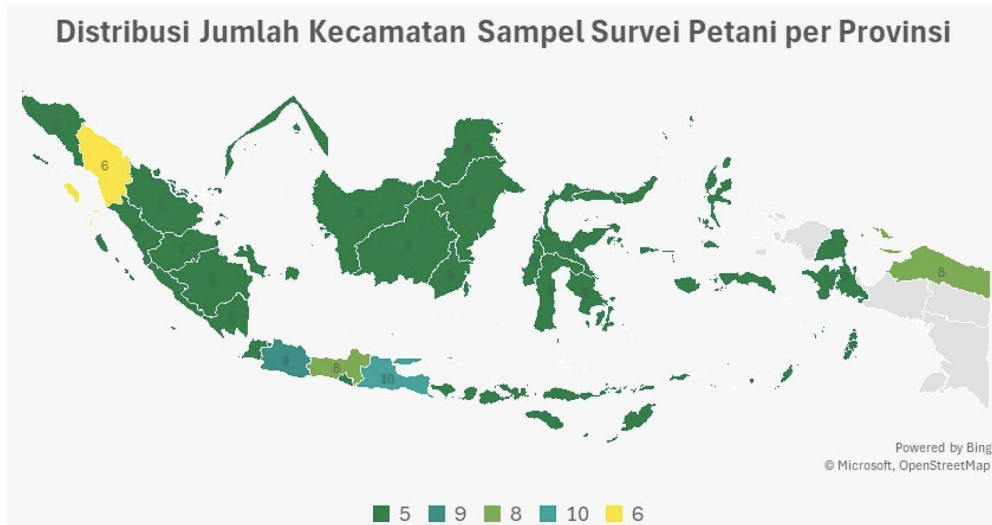
ΣPU : Jumlah Total Sample Pelaku Usaha Pertanian

Survei dilaksanakan di 34 provinsi dengan cakupan 186 kecamatan sebagai lokasi sampel. Pada setiap kecamatan ditetapkan 5 responden petani, sehingga total responden yang terlibat dalam survei ini berjumlah 930 orang. Sebagian besar provinsi mencakup 5 kecamatan atau setara dengan 25 responden, sehingga distribusi sampel relatif merata di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa provinsi dengan karakteristik wilayah dan jumlah pelaku usaha pertanian yang lebih besar memperoleh cakupan responden yang lebih luas, yaitu Jawa Timur (50 responden), Jawa Barat (45 responden), Jawa Tengah (40 responden), Papua (40 responden), dan Sumatera Utara (30 responden). Pendekatan penarikan sampel ini dirancang untuk memastikan bahwa data survei representatif secara nasional, dengan mempertimbangkan keragaman kondisi wilayah.

AGRO MODERN

Peta distribusi jumlah kecamatan sampel survei per provinsi disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. Distribusi Jumlah Kecamatan Sampel Survei Petani per Provinsi

SP. 2 IKP.2

Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Memanfaatkan Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan (%)

Target
44,15 %

Realisasi
42,26 %

Capaian
95,71 % (Berhasil)

Berdasarkan data tersebut di atas capaian indikator Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Memanfaatkan Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan (%) dapat dikategorikan berhasil dengan realisasi 42,26% dengan persen capaian 95,71%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru.

SP.3

Terwujudnya pelestarian sumber daya genetik pertanian

Indeks pelestarian sumber daya genetik (SDG) pertanian adalah ukuran untuk mengevaluasi keberhasilan upaya pelestarian sumber daya genetik pertanian pada tahun berjalan. Ukuran untuk mengevaluasi keberhasilan upaya pelestarian SDG pertanian, untuk memastikan ketersediaan materi genetik yang dibutuhkan, misalnya untuk pemuliaan tanaman terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, hama dan penyakit baru, serta kebutuhan pangan global yang terus meningkat.

Sumber data indikator diperoleh dari BBPM Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Sumber daya genetik pertanian yang dinilai dalam indeks ini hanya yang tersedia dan dikelola pada Bank Gen, ruang koleksi/ *cold storage*, atau kebun koleksi yang dikelola satuan kerja BRMP. Sumber daya genetik pertanian tersedia adalah jumlah sumber daya genetik yang terkoleksi di bank gen, ruang koleksi/*cold storage*, kebun koleksi. Sumber daya genetik pertanian terkelola adalah jumlah sumber daya genetik yang terejuvinsi/terkarakterisasi/terevaluasi/termanfaatkan untuk perakitan varietas unggul baru dan atau produksi benih. Indeks pelestarian sumber daya genetik pertanian dihitung menggunakan formula, sebagai berikut:

$$IPSDGP = \frac{\text{Jumlah Sumber Daya Genetik Pertanian Terkelola}}{\text{Jumlah Sumber Daya Genetik Pertanian Tersedia}} \times 100$$

Dimana:

IPSDGP = Indeks pelestarian sumber daya genetik pertanian

$\Sigma SDGP_{tl}$ = Jumlah Sumber Daya Genetik Pertanian yang Terkelola

$\Sigma SDGP_{ts}$ = Jumlah Sumber Daya Genetik Pertanian yang Tersedia

Sehingga,

$$IPSDGP = \frac{4.704 \text{ Sumber Daya Genetik Pertanian Terkelola}}{4.704 \text{ Sumber Daya Genetik Pertanian Tersedia}} \times 100 = 100\%$$

Dengan kriteria indeks: Indeks 1 (sangat rendah): 0% - 25%; 2 (rendah) : 26% - 50%; 3 (sedang) : 51% -75%; 4 (tinggi): 76% - 100%.

SP. 3 IKP.3	
Indeks pelestarian sumber daya genetik pertanian (indrks (1-4))	
Target 4	Realisasi 4
Capaian 100 (Berhasil)	

Berdasarkan data tersebut di atas capaian indikator Indeks pelestarian sumber daya genetik pertanian (indeks (1-4)) dapat dikategorikan berhasil dengan realisasi 4 dengan persen capaian 100%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Rincian SDG pertanian Tahun 2025 disajikan pada tautan berikut: <https://bit.ly/SDGpertanianBRMP2025>.

SP.4**Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel**

Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian merepresentasikan tata kelola birokrasi di lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagai bagian yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Indeks tata kelola birokrasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian diukur berdasarkan lima parameter meliputi:

1. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP.
2. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP.
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP.
4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BRMP.
5. Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP.

Semakin tinggi indeks tata kelola birokrasi lingkup BRMP, maka semakin baik tata kelola birokrasinya serta semakin tinggi dukungan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Cara menghitung:

$$Itakel = (WTL 1 \times (TL 1/100)) + (WTL 2 \times (TL 2/100)) + (WIKPA \times (IKPA/100)) + (WIKM \times (IKM/4)) + (WLINT \times (LINT/4))$$

Keterangan:

Itakel	: Indeks tata kelola birokrasi BRMP
WTL 1	: Bobot pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait tugas dan fungsi BRMP (20%)
TL1	: Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP
WTL 2	: Bobot pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP (20%)
TL 1	: Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP
WIKPA	: Bobot Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP (20%)
IKPA	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP
WIKM	: Bobot Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BRMP (20%)
IKM	: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BRMP

- WLINT : Bobot kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP (20%)
- LINT : Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP

Nilai lima parameter yang menjadi patokan pengukuran, sebagai berikut:

Tabel 4. Parameter Pengukuran Sasaran Program Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Program (SP)	Nilai
1	TL1: Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Itjen terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (0-100)	97,26
2	TL2: Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (0-100)	100
3	IKPA: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (0-100)	95,45
4	IKM: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian → Dikonversi menjadi 1-4	3,68
5	LINT: Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP→ Indeks 1-4	3,43
	Indeks (Skala 0-1)	0,941

Sehingga nilai indeks tata kelola:

$$= (20\% \times (97,26/100)) + (20\% \times (100/100)) + (20\% \times (95,45/100)) + (20\% \times (3,68/4)) + (20\% \times (3,43/4))$$

$$= 0,941$$

SP.4 IKP.4	
Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Indeks)	
Target 0,80000	Realisasi 0,941
Capaian 117 % (Sangat berhasil)	

Berdasarkan data tersebut di atas capaian indikator kinerja terkait Indeks Tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi pertanian dapat dikategorikan sangat berhasil dengan realisasi 0,936 dan persen capaian sebesar 117%. Terhadap indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru.

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 5. Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target BRMP 2023-2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target/ Realisasi	Tahun		
					2023	2024	2025
1	Meningkatnya Sertifikasi Usahatani Nasional	1.1 Persentase Usahatani Berbadan Hukum Yang Tersertifikat	%	Target	NA	NA	13,07
				Realisasi	NA	NA	14,49
				Capaian	NA	NA	110,86
2	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	2.1 Persetanse Pelaku Usaha Pertanian Yang Memanfaatkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan	%	Target	NA	NA	44,15
				Realisasi	NA	NA	42,26
				Capaian	NA	NA	95,71
3	Terwujudnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian	3.1 Indeks Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian	Skala (1-4)	Target	NA	NA	4,00
				Realisasi	NA	NA	4,00
				Capaian	NA	NA	100
4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Baik, Transparan dan Akuntabel	4.1 Indeks Tata Kelola Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Indeks (0-1)	Target	NA	NA	0,8000
				Realisasi	NA	NA	0,941
				Capaian	NA	NA	117

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja BRMP 2023-2025 tidak dapat diperbandingkan. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh proses penyesuaian kelembagaan dan penyempurnaan sistem perencanaan serta pengukuran kinerja BRMP. Capaian tahun 2025 selanjutnya akan digunakan sebagai baseline untuk mengukur tren kinerja dan peningkatan capaian pada periode perencanaan berikutnya, sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.1.3. Perbandingan antara target dan realisasi dengan target jangka menengah

Tahun 2025 adalah tahun pertama pada periode Renstra Lembaga baru BRMP 2025-2029. Pada tahun ini, capaian kinerja BRMP menunjukkan kinerja sangat baik.

Tabel 6. Perbandingan Antara Target dan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target/Realisasi	Tahun					% terhadap Target 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Sertifikasi Usahatani Nasional	1.1 Persentase Usahatani Berbadan Hukum Yang Tersertifikat (%)	Target	13,07	28,76	30,72	53,59	54,90	54,90
			Realisasi	14,49	-	-	-	-	14,49
			Capaian	110,86	-	-	-	-	26,39
2	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	2.1 Persentase Pelaku Usaha Pertanian Yang Memanfaatkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan (%)	Target	44,15	44,50	44,75	45,00	45,25	45,25
			Realisasi	42,26	-	-	-	-	42,26
			Capaian	95,71	-	-	-	-	93,39
3	Terwujudnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian	3.1 Indeks Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian (Skala (1-4))	Target	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
			Realisasi	4,00	-	-	-	-	4,00
			Capaian	100	-	-	-	-	100
4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Baik, Transparan dan Akuntabel	4.1 Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Indeks (0-1))	Target	0,8000	0,8005	0,801	0,8015	0,802	0,802
			Realisasi	0,941	-	-	-	-	0,941
			Capaian	117	-	-	-	-	117,33

Berdasarkan tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah, secara umum kinerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan berada pada jalur pencapaian Renstra.

Pada Sasaran Program Meningkatkan Sertifikasi Usahatani Nasional, indikator *Persentase Usahatani Berbadan Hukum yang Tersertifikasi* ditargetkan sebesar 13,07 persen pada tahun 2025 dan terealisasi 14,49 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 110,86 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja yang melampaui target tahunan, meskipun secara kumulatif baru mencapai 26,39 persen terhadap target akhir tahun 2029 sebesar 54,90 persen, sehingga masih diperlukan upaya akselerasi pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada Sasaran Program Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Pertanian, indikator *Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Memanfaatkan Teknologi Digital* ditargetkan 44,15 persen dan terealisasi 42,26 persen, dengan tingkat capaian 95,71 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target tahunan, dan secara kumulatif telah mencapai 93,39 persen dari target akhir 2029.

Pada Sasaran Program Terwujudnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian, indikator *Indeks Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian* ditargetkan pada nilai 4,00 dan terealisasi 4,00, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan konsistensi dan keberhasilan dalam menjaga pelestarian sumber daya genetik pertanian sesuai standar yang ditetapkan hingga akhir periode Renstra.

Sementara itu, pada Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Baik, Transparan, dan Akuntabel, indikator *Indeks Tata Kelola Birokrasi* ditargetkan sebesar 0,8000 dan terealisasi 0,941, dengan capaian kinerja 117 persen. Capaian ini melampaui target tahunan dan telah mencapai 117,33 persen terhadap target akhir tahun 2029, yang mencerminkan penguatan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah melampaui target tahunan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target jangka menengah. Ke depan, diperlukan penguatan strategi pada indikator yang masih berada di bawah target tahunan agar pencapaian target Renstra dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian kinerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) selama tahun pelaporan menunjukkan adanya keberhasilan sekaligus dinamika peningkatan dan penurunan pada beberapa indikator kinerja. Keberhasilan dan peningkatan kinerja terutama dipengaruhi oleh penataan kelembagaan BRMP yang memperkuat integrasi fungsi perakitan, modernisasi, dan standarisasi instrumen pertanian. Perubahan kelembagaan tersebut mendorong kejelasan mandat organisasi, peningkatan fokus program, serta penyelarasan perencanaan kinerja dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian. Koordinasi internal antar unit kerja juga semakin meningkat seiring dengan penyesuaian struktur organisasi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terarah dan efektif.

Namun demikian, pada sebagian indikator kinerja masih terdapat capaian yang belum optimal atau mengalami penurunan. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi

oleh masa transisi perubahan kelembagaan yang memerlukan penyesuaian proses bisnis, pembagian peran, serta penataan kewenangan antar unit kerja. Perubahan dan rasionalisasi anggaran, terutama pada belanja modal, turut membatasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang bersifat investasi jangka panjang. Di samping itu, kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan mengimplementasikan indikator kinerja baru belum sepenuhnya merata, serta keterbatasan sistem data kinerja yang terintegrasi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara komprehensif. Faktor eksternal, seperti dinamika kebijakan nasional dan perubahan prioritas pembangunan pertanian, juga turut mempengaruhi capaian kinerja organisasi.

Sebagai upaya perbaikan dan tindak lanjut atas berbagai tantangan tersebut, BRMP telah melakukan sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut meliputi penyempurnaan proses bisnis dan standar operasional prosedur untuk memastikan keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi pasca perubahan kelembagaan, penajaman indikator dan target kinerja agar lebih realistis dan terukur, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi melalui reviu kinerja secara berkala. Selain itu, BRMP mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja utama, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui penyesuaian penugasan dan penguatan jabatan fungsional. Sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik di lingkungan Kementerian Pertanian maupun dengan pihak eksternal, juga terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian kinerja BRMP secara berkelanjutan.

3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, dengan menetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran. SBK merupakan indeks biaya untuk menghasilkan satu volume keluaran dan menjadi bagian dari Standar Biaya yang mencakup Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Struktur Biaya (SSB), dengan prinsip utama efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Berdasarkan PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang SBK Tahun 2025, hasil monitoring pada aplikasi Monev Kemenkeu menunjukkan terdapat 197 penggunaan SBK di seluruh satuan kerja lingkup BRMP, yang tersebar pada delapan Rincian Output (RO), meliputi: (1) RO Layanan BMN, (2) RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, (3) RO Layanan Manajemen SDM, (4) RO Layanan Pendidikan dan Pelatihan, (5) RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, (6) RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi, (7) RO Layanan Manajemen Keuangan, dan (8) RO Layanan Reformasi Kinerja. Sebaran penggunaan SBK disajikan pada Lampiran 11 dan hasil monitoring penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagaimana disajikan pada Lampiran 12. Nilai efisiensi penggunaan SBK sebesar 97,97 dan efisiensi SBK sebesar 98,50 pada Unit Eselon I BRMP tahun 2025 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 6.

No. *	Kode UEI %	UEI %	NK Perencanaan Anggaran %	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP %	CRO %	Penggunaan SBK %	Efisiensi SBK %
1	09	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	69.51	0.00	99.86	97.97	98.50

Gambar 6. Nilai Efisiensi Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK BRMP Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aspek efisiensi, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menunjukkan capaian yang baik. Tingkat penggunaan SBK tercatat sebesar 97,97 persen, mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah mengacu secara konsisten pada standar biaya yang ditetapkan. Selanjutnya, nilai **Efisiensi SBK** mencapai **98,50 persen**, mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan secara ekonomis. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien.

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja BRMP Tahun 2025 dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Secara umum, sebagian besar program dan kegiatan telah mendukung pencapaian kinerja, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan yang menghasilkan inovasi sesuai kebutuhan pembangunan pertanian, penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang mendorong efisiensi penggunaan anggaran, serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan diseminasi hasil perekayasaan teknologi. Kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja dan peningkatan kualitas output.

Sementara itu, kendala pencapaian kinerja terutama disebabkan oleh penyesuaian kebijakan pada tahun awal periode Renstra, penyesuaian kelembagaan dan keterbatasan waktu pelaksanaan, serta belum optimalnya pemanfaatan dan hilirisasi hasil kegiatan. Selain itu, perbedaan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana antar satuan kerja turut mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja.

Ke depan, BRMP perlu terus memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan agar pencapaian kinerja semakin efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3.1.7. Capaian kinerja lainnya

Selama tahun 2025, BRMP juga meraih beberapa capaian dan prestasi lain, diantaranya:

- a. Terdapat 24 Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan dari usulan BRMP Tahun 2025

Tabel 7. SNI yang ditetapkan dari usulan BRMP Tahun 2025

No	Pengusul (Satker)	Judul SNI
1	BPP Tanaman Aneka Kacang	SNI 3923:2025 Kacang hijau; Revisi SNI 01-3923-1995 Kacang hijau
2	BPP Tanaman Buah Tropika	SK Kepala BSN No. 742/KEP/BSN/12/2025 Manggis
3	BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	SK Kepala BSN No. 744/KEP/BSN/12/2025 Jeruk Siam
4	BPP Tanaman Hias	SK Kepala BSN No. 743/KEP/BSN/12/2025 Daun potong pakis leather leaf
5	BPP Tanaman Sayuran	SK Kepala BSN No. 745/KEP/BSN/12/2025 Benih Kentang (<i>Solanum tuberosum</i> L.) stek berakar kelas benih dasar
6	BPP Tanaman Industri	SNI 4:2025 Lada Putih ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 808/KEP/BSN/12/2025
7	BPP Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	SNI 1902:2025 Teh Hitam ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 809/KEP/BSN/12/2025
8	LPP Ruminansia Besar	SNI Pelayanan Inseminasi Buatan
9	LPP Ruminansia Besar	Dedak Jagung sebagai Pakan Ternak
10	BPP Unggas dan Aneka Ternak	SNI Bibit Ayam Umur Sehari/Kuri Bagian 7 Gaosi - 1 Agrinak
11	LPP Ruminansia Kecil	SNI Pakan Konsentrat - Bagiaann X:Kambing Perah
12	LPP Ruminansia Kecil	SNI Pakan Konsentrat - Bagian X:Domba Penggemukan
13	LPP Ruminansia Kecil	SNI Onggok - Bahan Pakan Ternak
14	BBPMP SDLP	SNI 8474:2025 Penyusunan peta kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian strategis semidetil skala 1:50.000
15	BPP Tanah dan Pupuk	SNI 9380:2025 Terak untuk Pertanian
16	BPP Tanah dan Pupuk	SNI 6679:2025 Pengelompokan dan terminology bahan penyubur tanaman
17	BPP Tanah dan Pupuk	SNI 9421:2025 Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit
18	BPP Agroklimat	SNI 9416:2025 Tata laksana pengamatan dan pengelolaan data agroklimat
19	BPP Lahan Rawa	SNI 9415:2025 Penyiapan Lahan untuk Tanaman Padi di Lahan RAwa Pasang Surut
20	BBPMP Biogen	SK BSN 658/KEP/BSN/12/2025; Pengelolaan bank gen in vitro tumbuhan
21	BBPMP Biogen	SK BSN 634/KEP/BSN/11/2025; Metode deteksi gen ketahanan padi terhadap hama wereng batang cokelat berbasis molekuler

No	Pengusul (Satker)	Judul SNI
22	BBPM Pascapanen	SNI 9422:2025 Pedomaan Penanganan Pascapanen Lada Putih, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 764/KEP/BSN/12/2025
23	BBPM Pascapanen	SNI 9423:2025 Pedoman Proses Pascapanen Jagung (Zea Mays L.) Menjadi Beras Jagung, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 770/KEP/BSN/12/2025
24	BBPM Pascapanen	SNI 9424:2025 Pedoman Proses Pascapanen Cabai (Capsicum Annuum dan Capsicum Frutescens) Menjadi Cabai Kering, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor. 771/KEP/BSN/12/2025

b. Produksi Benih

Tabel 8. Capaian Produksi Benih Sumber Tahun 2025

No	Komoditas	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
1	Padi	2,182	2265,56	103,83
2	Kedelai	7	7	100
3	Gandum	7	7,32	104,57
4	Bawang Putih	200	111,3*	-

*calon benih umbi basah

c. Penghargaan-Penghargaan

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 5530/Kpts./HM.130/A/12/2025 tentang Penetapan Pemenang Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025, BRMP memperoleh penghargaan sebagai berikut:

- Peringkat 2 Badan Publik Informatif Kategori Eselon I
- Predikat Informatif Kategori Eselon II pada 11 Eselon II, yaitu:
 1. Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
 2. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
 3. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Lahan Pertanian
 4. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi
 5. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 6. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
 7. Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan
 8. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
 9. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan
 10. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
 11. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
- Predikat Informatif Kategori Eselon III pada 45 Satuan Kerja
 1. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
 2. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

3. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
4. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika
5. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
6. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia
7. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran
8. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I Yogyakarta
9. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan
10. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bangka Belitung
11. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara
12. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau
13. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat
14. Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
15. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi
16. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu
17. LoKa Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar
18. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
19. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat
20. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat
21. Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
22. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
23. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah
24. Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
25. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
26. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur
27. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
28. Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
29. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Jeruk dan Subtropika
30. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
31. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
32. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua
33. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
34. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten
35. Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi
36. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
37. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang
38. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh
39. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur
40. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil
41. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku
42. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali
43. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat
44. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur

- 45. Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
 - Akreditasi Perpustakaan
BBPM Veteriner: Penghargaan Juara III Perpustakaan Terinspirasi Tahun 2025 lingkup Kementerian Pertanian
 - Nilai IKPA
 1. PPMP Hortikultura: satker dengan Nilai IKPA terbaik dan Realisasi Penggunaan UP KKP Melebihi Target dari KPPN Bogor
 2. BBPM Veteriner: satker dengan capaian nilai IKPA sempurna (100%) dari KPPN Bogor
 - Penghargaan sebagai Pionir Inpro V6 dari Biro Pengadaan Kementan: Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
- d. Sertifikasi/Penerapan ISO
 - Sertifikat ISO 9001:2015 Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - Sertifikat ISO 9001:2015 Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Sertifikat ISO 9001:2015 Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil
 - Sertifikat ISO 17025 Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
- e. Kegiatan International
 - Tuan rumah *The 19th Steering Committee Meeting of The ASEAN-AVRDC Regional Network for Vegetable Research and Development (AARNET) yang diselenggarakan World Vegetable Center*

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP, BRMP pada Tahun Anggaran 2025 mengelola anggaran sebesar Rp929.038.379.000,00 pada DIPA awal BRMP yang terbit tanggal 02 Desember 2024. Pada pelaksanaan anggaran terdapat perubahan anggaran melalui revisi DIPA/RKA-KL sebanyak 10 kali sepanjang tahun 2025, meliputi:

- a. Revisi DIPA ke-1 pada tanggal 20 Februari 2025 tentang Revisi Pencantuman Catatan Halaman IV.A DIPA Kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) dalam rangka Efisiensi Belanja APBN sebesar Rp119.031.434.000,00. Revisi ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA. 2025, Surat Menteri Keuangan: S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA.2025, serta Memorandum Menteri Pertanian Nomor: 36 /RC.110/M/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementan TA. 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pagu hanya

- perubahan total blokir BSIP dari semula sebesar Rp323.057.745.000,00 menjadi sebesar Rp350.514.981.000,00.
- b. Revisi DIPA ke-2 pada tanggal 25 Maret 2025 tentang Revisi Penghapusan Blokir Efisiensi Belanja APBN dan pergeseran anggaran antar program antar satker pada kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada sebesar Rp83.530.000.000,00. Dasar kebijakannya Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor 135/RC.010/M/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang penugasan kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk melaksanakan kegiatan produksi benih sumber dan pendampingan dan/atau pengawalan terhadap kegiatan strategis Kementerian Pertanian, Surat Persetujuan Menteri Pertanian Nomor 133/RC.110/M/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang usulan revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar Program lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan Surat Menteri Pertanian Nomor B-134/RC.110/M/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 Hal Usulan Revisi Pembukaan Blokir Efisiensi Belanja Kementerian Pertanian TA 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu hanya mengakibatkan pergeseran anggaran antar program antar satker dan perubahan total blokir dari semula sebesar Rp350.514.981.000,00 menjadi sebesar Rp323.057.745.000,00.
- c. Revisi DIPA ke-3 pada tanggal 30 April 2025 tentang Revisi Realokasi Internal dan Penghapusan Blokir Anggaran BRMP, yaitu 1) Pergeseran anggaran antar program antar satker dari Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (NTDSI) satker BRMP Padi sebesar Rp36.470.000.000,00 ke program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (KAKPB) satker BRMP Padi dan 22 satker lingkup BRMP Penerapan untuk kegiatan produksi benih sumber padi; 2) Pergeseran anggaran antar kegiatan antar RO pada Program NTDSI yaitu pada kegiatan sumber dana PLN (Rp130.000.000.000,00) dan PNPB (Rp17.558.197.000,00) sehubungan dengan adanya transformasi Lembaga sehingga perlu penyesuaian informasi kinerja; 3) Pada Kegiatan Dukman, terdapat pergeseran anggaran antar KRO/RO dari Layanan Umum sebesar Rp83.530.000.000,00 dan RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp3.240.000.000,00 ke RO Koordinasi Program Strategis Kementan; dan 4) Penghapusan blokir anggaran perbenihan, program strategis Kementan, dan dukungan manajemen satker. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu hanya mengakibatkan pergeseran anggaran antar program antar satker dan perubahan total blokir dari semula sebesar Rp323.057.745.000,00 menjadi sebesar Rp189.677.209.000,00.
- d. Revisi DIPA ke-4 pada tanggal 1 Juli 2025 tentang Revisi Realokasi Internal dan Penghapusan Blokir Anggaran pada Proyek *Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment* (ICARE) pada Komponen A dan B di 10 PIU sehubungan dengan adanya penyesuaian alokasi anggaran per PIU berdasarkan AWP dan diperolehnya NoL atas AWP. Revisi ini tidak

- mengakibatkan perubahan total pagu hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker dan perubahan total blokir dari semula sebesar Rp189.677.209.000,00 menjadi sebesar Rp133.697.004.000,00.
- e. Revisi DIPA ke-5 pada tanggal 4 Juli 2025 ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran tentang pergeseran anggaran antar satker pada Program Dukungan Manajemen dalam rangka pemenuhan kekurangan anggaran belanja pemeliharaan kendaraan roda 4 dan penambahan/pengalihan anggaran honorarium PPNPN yang melibatkan tiga satker, yaitu Sekretariat BRMP, BBPM Pascapanen Pertanian, dan BPMP Jakarta. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu BRMP, hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker.
 - f. Revisi DIPA ke-6 pada tanggal 2 September 2025 tentang Revisi Realokasi Internal dan Penghapusan Blokir Anggaran BRMP, yaitu 1) Pergeseran anggaran antar jenis belanja antar satker dari Belanja Barang Operasional (002) ke Belanja Pegawai Operasional (001) sebesar Rp9.426.763.000,00 untuk pemenuhan gaji PPPK Tahap I; 2) Pergeseran anggaran antar program antar satker dari Program Dukungan Manajemen dialihkan ke Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp10.545.422.000,00 untuk perbenihan tiga komoditas strategis (kedelai, gandum, bawang putih); 3) Pergeseran anggaran antar RO dalam rangka penyesuaian RO; dan 4) Penghapusan blokir penyesuaian RO, Relaksasi Perjadin, dan Kegiatan ICARE (Komponen C dan Modal di Komponen A) sebesar Rp28.464.929.000,00. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pagu total hanya perubahan pagu per program, per jenis belanja, dan per satker serta perubahan total blokir dari semula sebesar Rp133.697.004.000,00 menjadi sebesar Rp105.232.075.000,00.
 - g. Revisi DIPA ke-7 pada tanggal 19 September 2025 tentang Penyesuaian/Penambahan Pagu PNBP dan Penghapusan Blokir anggaran BRMP, yaitu 1) Pergeseran/Penyesuaian anggaran antar program dan/atau antar satker yang bersumber dari penerimaan PNBP dan 2) Penghapusan blokir sumber dana PNBP dan PLN sehubungan dengan telah adanya ijin penggunaan PNBP BRMP, persetujuan relaksasi blokir anggaran perjalanan dinas, dan perhitungan PUPR lantai jemur BRMP Jawa Timur. Revisi ini mengakibatkan penambahan pagu BRMP dari semula sebesar Rp929.038.379.000,00 menjadi sebesar Rp931.868.811.000,00 dan perubahan total blokir dari semula sebesar Rp105.232.075.000,00 menjadi sebesar Rp72.518.733.000,00.
 - h. Revisi DIPA ke-8 pada tanggal 3 Oktober 2025 ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran tentang pergeseran anggaran antar satker sehubungan dengan pemenuhan kekurangan anggaran belanja Operasional dan pemeliharaan gedung/ bangunan/ rumah dinas /mess /halaman/ pagar/jalan/ kandang dan saluran irigasi/kegiatan kerumahtanggaan satker, monitoring dan evaluasi serta kegiatan pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) dan produksi Benih

Sumber Bawang Putih yang merupakan Program Strategis Kementerian Pertanian dalam rangka mencapai Swasembada Pangan yang melibatkan 63 satker. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu BRMP, hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker.

- i. Revisi DIPA ke-9 pada tanggal 30 Oktober 2025 tentang Realokasi Internal dan Penghapusan Blokir ICARE, PNBP, dan RM Non Perjadin meliputi kegiatan Matching Grant, Pengadaan APD Alsintan di 3 PIU, Pengadaan Kendaraan Fungsional, dan Penyesuaian Item Belanja yang di efisiensi. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu BRMP hanya mengakibatkan perubahan total blokir dari semula sebesar Rp72.518.733.000,00 menjadi sebesar Rp27.785.707.000,00.
- j. Revisi DIPA ke-10 pada tanggal 19 November 2025 ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran tentang Realokasi Internal sehubungan dengan pemenuhan anggaran Belanja Pegawai (001) dan belanja barang operasional (002) untuk mengakomodir kekurangan gaji PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Tenaga Non ASN dan perbaikan jalan/drainase dampak dari banjir serta Belanja Barang Non Operasional untuk kegiatan koordinasi pengusulan penetapan lahan satker baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang melibatkan 39 satker Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu BRMP, hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker.

Selain revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdapat revisi penambahan pagu PNBP dan Hibah Langsung Luar Negeri ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang dilakukan secara mandiri oleh beberapa satker, yaitu:

- a. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (648716), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp129.500.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 10 November 2025;
- b. Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (648669), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp598.800.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 11 November 2025;
- c. Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu (633996), penambahan pagu PNBP sebesar Rp80.000.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 13 November 2025;
- d. Satker Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar (648720), penambahan pagu PNBP sebesar Rp244.800.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 13 November 2025;
- e. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang (411993), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp294.376.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 15 November 2025;
- f. Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (237242), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp1.384.377.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 16 November 2025;

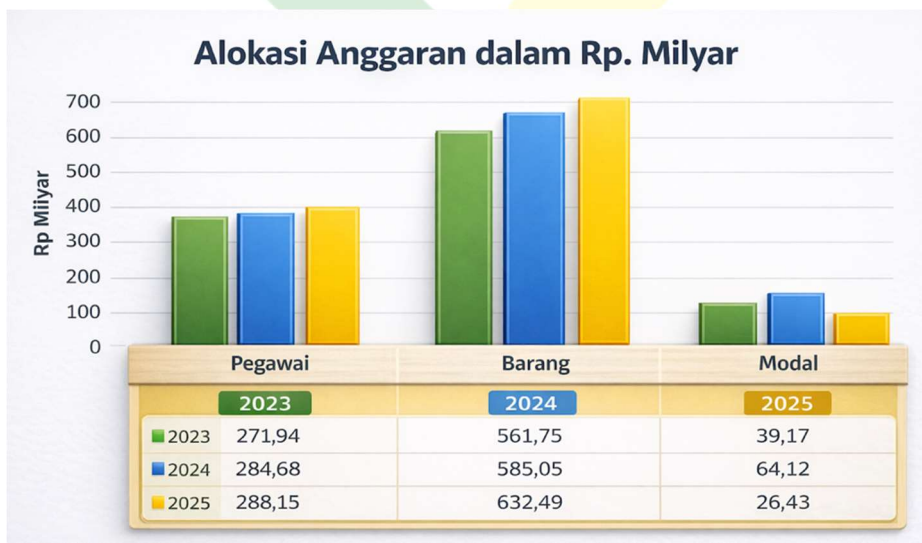
- g. Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta (633975), penambahan pagu PNBP sebesar Rp96.410.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 17 November 2025;
- h. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias (411987), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp1.663.439.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 18 November 2025;
- i. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (237306), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp237.225.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 21 November 2025;
- j. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat (237572), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp217.380.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 25 November 2025;
- k. Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten (450831), penambahan pagu PNBP sebesar Rp245.184.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 27 November 2025;
- l. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran (237217), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp743.386.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 28 November 2025;
- m. Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi (237238), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp1.173.605.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 30 November 2025;
- n. Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (567495), penambahan pagu PNBP sebesar Rp47.039.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 2 Desember 2025;
- o. Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (537628), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp549.550.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 9 Desember 2025;
- p. Satker Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (648673), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp451.612.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 15 Desember 2025;
- q. Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (237221), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp3.664.121.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 29 Desember 2025; dan
- r. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk (648680), penambahan pagu Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp3.384.696.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 30 Desember 2025.

Perubahan-perubahan tersebut di atas mengakibatkan perubahan alokasi anggaran BRMP menjadi sebesar **Rp947.074.311.000,00** (data OM SPAN per 23 Januari 2026) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp288.149.673.000,00, belanja barang sebesar Rp632.493.341.000, dan belanja modal sebesar Rp26.431.297.000,00. Persentase alokasi anggaran BRMP TA 2025 dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Anggaran BRMP TA 2025 per Jenis Belanja

Memperhatikan komposisi penyediaan anggaran di atas berdasarkan jenis belanja memperlihatkan belanja barang menempati penyediaan anggaran yang paling tinggi. Hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator bahwa operasional pelaksanaan kegiatan di BRMP, lebih membutuhkan belanja barang, termasuk untuk pendanaan kegiatan perbenihan dan pemeliharaan sarana prasarana, pinjaman Luar Negeri (*project* ICARE), PNBP, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Sedangkan belanja modal dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas sarana prasarana perbenihan, laboratorium maupun operasional kegiatan rutin berupa peralatan dan atau bangunan. Rincian alokasi anggaran berupa belanja pegawai, belanja barang dan modal dari tahun 2023-2025 dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Grafik Alokasi Anggaran Tahun 2023-2025

Selanjutnya, sebaran alokasi anggaran BRMP TA 2025 per Program sampai dengan Level Output disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Sebaran Anggaran per Program s.d Level Output TA 2025

Kode	Program/Kegiatan /KRO/RO	Target	Satuan	Anggaran (Rp000)	Blokir (Rp000)	Anggaran Efektif (Rp000)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			164.570.254	248.661	164.321.593
7911	Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian			164.570.254	248.661	164.321.593
7911.AEF.109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	7.669	Orang	3.561.066	-	3.561.066
7911.AEF.110	Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan	903	Orang	361.260	-	361.260
7911.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	14	Lembaga	673.823	1.200	672.623
7911.BJA.101	Laporan Hasil Uji Instrumen Tanaman Pangan	146	Produk	3.049.281	-	3.049.281
7911.BJA.102	Laporan Hasil Uji Instrumen Hortikultura	455	Produk	3.505.571	-	3.505.571
7911.BJA.103	Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan	1.308	Produk	1.100.550	-	1.100.550
7911.BJA.104	Laporan Hasil Uji Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.259	Produk	3.036.332	-	3.036.332
7911.BJA.105	Laporan Hasil Uji Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	15	Produk	3.726.536	-	3.726.536
7911.BJA.106	Laporan Hasil Uji Instrumen Pascapanen Pertanian	200	Produk	1.109.798	-	1.109.798
7911.BJA.107	Laporan Hasil Uji Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	23.771	Produk	6.754.376	-	6.754.376
7911.BJA.108	Laporan Hasil Uji Instrumen Alat dan Mesin Pertanian	125	Produk	2.512.485	-	2.512.485
7911.BJA.109	Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian	582	Produk	715.880	-	715.880
7911.CAG.101	Sarana Laboratorium Tanaman Pangan Modern	88	Unit	2.172.979	-	2.172.979
7911.CAG.102	Sarana Laboratorium Hortikultura Modern	12	Unit	224.738	-	224.738
7911.CAG.103	Sarana Laboratorium Perkebunan Modern	30	Unit	635.243	-	635.243
7911.CAG.104	Sarana Laboratorium SDLP Modern	9	Unit	50.223	-	50.223
7911.CAG.105	Sarana Laboratorium Pertanian Modern	106	UNit	1.380.113	-	1.380.113
7911.QDB.101	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	10	Lembaga	130.000.000	247.461	129.752.539
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			47.015.422	68.188	46.947.234
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian			47.015.422	68.188	46.947.234
7912.RAG.101	Benih Sumber Tanaman Pangan	234	Ton	4.834.580	9.765	4.824.815
7912.RAG.102	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	1.967	Ton	32.163.640	58.423	32.105,217
7912.RAG.103	Benih Sumber Tanaman Hortikultura	52	Ton	2.604.402	-	2.604.402
7912.RAG.104	Benih Sumber Tanaman Hortikultura Spesifik Lokasi	148	Ton	7.412.800	-	7.412.800
WA	Program Dukungan Manajemen			735.488.635	27.468.858	708.019.777
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian			735.488.635	27.468.858	708.019.777
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	63	Kegiatan	72.215.648	21.855.599	50.360.049

Kode	Program/Kegiatan /KRO/RO	Target	Satuan	Anggaran (Rp000)	Blokir (Rp000)	Anggaran Efektif (Rp000)
6918.AEC.502	Layanan Kerjasama	2	Kegiatan	17.933.549	78.000	17.855.549
6918.EBA.956	Layanan BMN	64	Layanan	1.110.000	70.079	1.039.921
6918.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan	321.488	-	321.488
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	64	Layanan	2.129.053	549.158	1.579.895
6918.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	310.500	-	310.500
6918.EBA.962	Layanan Umum	64	Layanan	18.382.650	2.363.753	16.018.897
6918.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	998.360	310.000	688.360
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	64	Layanan	317.830.961	-	317.830.961
6918.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.501	Orang	3.900.000	1.500.000	2.400.000
6918.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	26	Orang	1.300.000	-	1.300.000
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5	Dokumen	4.427.250	-	4.427.250
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	74	Dokumen	4.325.443	742.269	3.583.174
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3	Dokumen	1.550.000	-	1.550.000
6918.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan	429.060	-	429.060
6918.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	175.000	-	175.000
TOTAL				947.074.311	27.785.707	919.288.604

Realisasi belanja BRMP sampai Desember 2025 per 23 Januari 2025 adalah senilai Rp896.807.644.318,00 atau sebesar 94,69% (didalamnya termasuk anggaran blokir dalam rangka efisiensi Belanja APBN dan kelengkapan administrasi). Selengkapnya persentase realisasi per belanja dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.



Gambar 9. Grafik Persentase Realisasi Anggaran BRMP TA 2025.

Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp286.518.181,887,00 atau sebesar 99,43% dari alokasi anggaran senilai Rp288.149.673.000,00

Belanja Barang

Realisasi belanja barang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp584.468.464.994,00 atau sebesar 92,14% dari alokasi anggaran sebesar Rp632.493.341.000,00

Belanja Modal

Realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 25.820.997.437,00 atau sebesar 97,69% dari alokasi anggaran sebesar Rp26.431.297.000,00

Tabel 10. Realisasi Anggaran BRMP per Program/Kegiatan Tahun 2025 berdasarkan Anggaran Total

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi	
			Anggaran (Rupiah)	%
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	47.015.422.000	46.360.653.426	89,79
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	47.015.422.000	46.360.653.426	89,79
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	164.570.254.000	147.775.827.448	98,61
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian		147.775.827.448	98,61
3	Program Dukungan Manajemen	735.488.635.000	702.671.163.444	95,54
	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	735.488.635.000	702.671.163.444	95,54
TOTAL		947.074.311.000	896.807.644.318	94,69

Tabel 11. Realisasi Anggaran BRMP per Program/Kegiatan Tahun 2025 berdasarkan Pagu Efektif

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi	
			Anggaran (Rupiah)	%
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	46.947.234.000	46.360.653.426	98,75
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	46.947.234.000	46.360.653.426	98,75
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	164.321.593.000	147.775.827.448	89,93
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	164.321.593.000	147.775.827.448	89,93
3	Program Dukungan Manajemen	708.019.777.000	702.671.163.444	99,24
	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	708.019.777.000	702.671.163.444	99,24
TOTAL		919.288.604.000	896.807.644.318	97,55

Tabel 12. Realisasi Anggaran Lingkup BRMP per Output Tahun 2025 berdasarkan Pagu Efektif

RO - URAIAN	Anggaran (Rp)			Fisik (Laporan)		
	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						
Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	3.561.066.000	2.879.575.783	80,86	7.669	8.397	109,49
Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan	361.260.000	359.344.985	99,47	903	903	10,000
Lembaga Penerap Standar yang didampingi	672.623.000	659.659.137	98,07	14	18	128,57
Laporan Hasil Uji Instrumen Tanaman Pangan	3.049.281.000	3.045.274.000	99,87	146	201	137,67
Laporan Hasil Uji Instrumen Hortikultura	3.505.571.000	3.407.741.249	97,21	455	455	100,00
Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan	1.100.550.000	1.095.583.724	99,55	1.308	1.308	100,00
Laporan Hasil Uji Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.036.332.000	3.033.585.562	99,91	2.259	3.293	145,77
Laporan Hasil Uji Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	3.726.536.000	3.713.987.544	99,66	15	15	100,00
Laporan Hasil Uji Instrumen Pascapanen Pertanian	1.109.798.000	826.382.240	74,46	200	243	121,50
Laporan Hasil Uji Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	6.754.376.000	6.633.108.808	98,20	23.771	23.771	100,00
Laporan Hasil Uji Instrumen Alat dan Mesin Pertanian	2.512.485.000	1.973.787.133	78,56	125	125	100,00
Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian	715.880.000	690.036.392	96,39	582	582	100,00
Sarana Laboratorium Tanaman Pangan Modern	2.172.979.000	2.156.448.300	99,24	88	105	119,32
Sarana Laboratorium Hortikultura Modern	224.738.000	180.686.626	80,40	12	11	91,67
Sarana Laboratorium Perkebunan Modern	635.243.000	620.036.155	97,61	30	29	96,67
Sarana Laboratorium SDLP Modern	50.223.000	50.163.301	99,88	9	9	100,00
Sarana Laboratorium Pertanian Modern	1.380.113.000	1.308.532.801	94,81	106	106	100,00
Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	129.752.539.000	111.984.769.658	86,31	10	10	100,00
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
Benih Sumber Tanaman Pangan	4.824.815.000	4.809.559.652	99,48	234	240	102,56
Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	32.105.217.000	31.684.458.178	98,51	1.967	1.991	101,22

RO - URAIAN	Anggaran (Rp)			Fisik (Laporan)		
	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Benih Sumber Tanaman Hortikultura	2.604.402.000	2.551.533.964	97,97	52	52	100,00
Benih Sumber Tanaman Hortikultura Spesifik Lokasi	7.412.800.000	7.159.028.132	96,58	148	148	100,00
Program Dukungan Manajemen						
Koordinasi	50.360.049.000	48.820.158.325	96,94	63	63	100,00
Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian						
Layanan Kerjasama	17.855.549.000	17.793.610.445	99,65	2	2	100,00
Layanan BMN	1.039.921.000	1.020.386.720	98,12	64	64	100,00
Layanan Hukum	321.488.000	305.134.911	94,91	1	1	100,00
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.579.895.000	1.579.895.000	97,34	64	64	100,00
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	310.500.000	290.380.445	93,52	1	1	100,00
Layanan Umum	16.018.897.000	15.553.760.356	97,10	64	64	100,00
Layanan Data dan Informasi	688.360.000	674.732.239	98,02	2	2	100,00
Layanan Perkantoran	317.830.961.000			64	64	100,00
Layanan Manajemen SDM	2.400.000.000	2.363.655.631	98,49	3.501	2.908	83,06
Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1.300.000.000	1.025.263.888	78,87	26	26	100,00
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.427.250.000	4.297.322.235	97,07	5	5	100,00
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.583.174.000	3.395.183.008	94,75	74	74	100,00
Layanan Manajemen Keuangan	1.550.000.000	1.544.560.955	99,65	3	3	100,00
Layanan Reformasi Kinerja	429.060.000	414.721.097	96,66	1	1	100,00
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	175.000.000	171.275.524	97,87	1	1	100,00
Total	919.288.604.000	896.807.644.318	97,55			

Dari tabel realisasi anggaran per output di atas, dapat dilihat bahwa serapan anggaran per kegiatan lingkup BRMP tahun 2025 sebesar 97,55%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, dimana realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 98,24%, maka kinerja realisasi anggaran BRMP tahun 2024 lebih tinggi dibanding dengan tahun 2025. Hal ini diakibatkan adanya perubahan kelembagaan dari BSIP menjadi BRMP yang berimplikasi pada terblokirnya anggaran BRMP dan baru dapat diselesaikan proses buka blokirnya pada akhir triwulan tiga.

AGRO MODERN



AGRO MODERN

BAB IV

PENUTUP





AGRO MODERN

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan BRMP adalah mendukung program Eselon I lainnya dalam pencapaian visi dan misi Kementan. Bentuk dukungan utamanya adalah melalui peningkatan sertifikasi usahatani nasional guna menjamin mutu, nilai tambah, dan daya saing hasil pertanian, peningkatan pemanfaatan teknologi *digital, smart farming, dan modernisasi* pertanian, dan pelestarian sumber daya genetik (SDG) pertanian. Bentuk dukungan tersebut, dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama BRMP.

Capaian sasaran BRMP tahun 2025 diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang ditetapkan atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Adapun capaian fisik masing-masing indikator kinerja berkisar antara 95,71% - 117%.

Secara keseluruhan BRMP memiliki efisiensi penggunaan SBK sebesar 97,97 dengan nilai efisiensi SBK sebesar 98,50. Hal ini mengindikasikan bahwa BRMP dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah mengacu pada standar biaya dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan secara ekonomis.

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BRMP secara umum didukung dengan adanya : 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik, 2) Pelaksanaan koordinasi secara berjenjang di tingkat BRMP sampai ke UK dan UPT untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, dan 3) Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun dengan kementerian lain serta Pemerintah Daerah.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja adalah dengan : 1) Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan, 2) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara cermat, 3) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak eksternal BRMP, 4) Melakukan penambahan sumber daya manusia berdasarkan pemetaan kebutuhan yang akurat untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, dan 5) Melakukan penyusunan analisis dan penanganan risiko secara cermat untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

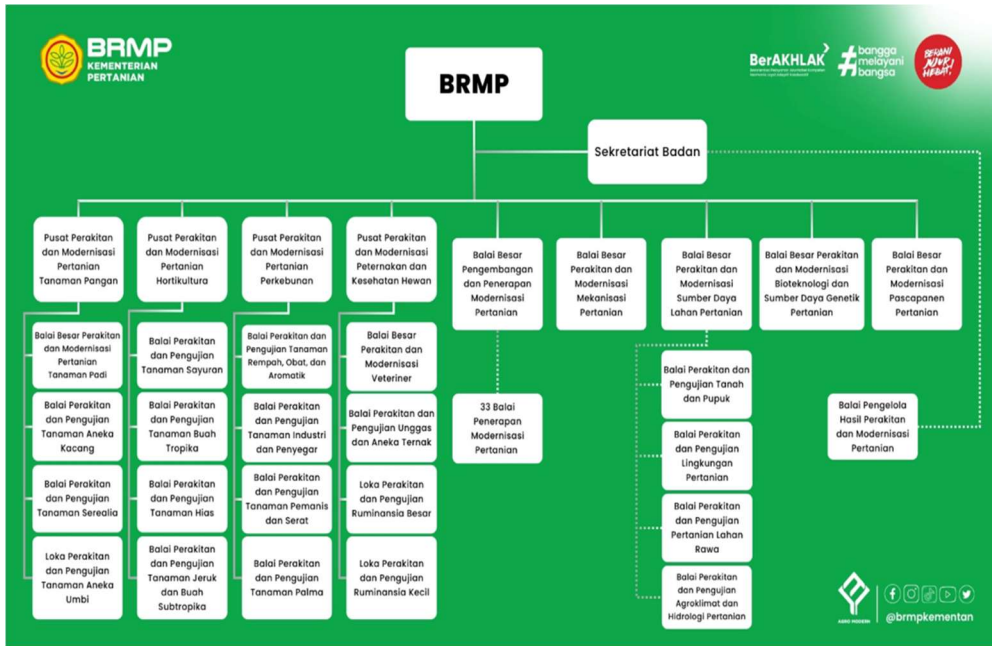
AGRO MODERN



LAMPIRAN

AGRO MODERN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BRMP Tahun 2025



AGRO MODERN

Lampiran 2. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian UK Tahun 2025

No	Unit Kerja	Status Pegawai				Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu	
1	Sekretariat BRMP	122	10	10	60	202
2	PPMP Tan. Pangan	188	16	50	154	408
3	PPMP Hortikultura	282	30	62	263	637
4	PPMP Perkebunan	261	33	67	256	617
5	PPMP PKH	135	26	43	211	415
6	BBPM Mektan	101	5	2	24	132
7	BBPM Biogen	45	11	12	34	102
8	BBOM Pascapanen	81	3	9	37	130
9	BBPM SDLP	233	19	20	130	402
10	BBPPMP	1607	196	296	608	2707
11	BBPM Tan. Padi	102	5	18	100	225
12	BBPM Veteriner	69	4	7	41	121
Jumlah		3226	358	596	1918	6098

AGRO MODERN

Lampiran 3. Nama dan Lokasi Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP)

No	Nama IP2MP	Lokasi
<i>Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi</i>		
1	IP2MP Kuningan	Kabupaten Kuningan
2	IP2MP Muara	Kota Bogor
3	IP2MP Sukamandi	Kabupaten Subang
<i>Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner</i>		
4	IP2MP Cimanglid	Kabupaten Bogor
<i>Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian</i>		
5	IP2MP Serpong	Kabupaten Tangerang
<i>Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian</i>		
6	IP2MP Cikeumeuh	Kota Bogor
7	IP2MP Citayam	Kota Depok
8	IP2MP Pacet	Kabupaten Cianjur
9	IP2MP Ciwale	Kabupaten Cianjur
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang</i>		
10	IP2MP Genteng	Kabupaten Banyuwangi
11	IP2MP Jambegede	Kabupaten Malang
12	IP2MP Kendalpayak	Kabupaten Malang
13	IP2MP Muneng	Kabupaten Probolinggo
14	IP2MP Ngale	Kabupaten Ngawi
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal</i>		
15	IP2MP Bajeng	Kabupaten Gowa
16	IP2MP Maros	Kabupaten Maros
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran</i>		
17	IP2MP Margahayu/Cikole	Kabupaten Bandung Barat
18	IP2MP Berastagi	Kabupaten Karo
19	IP2MP Serpong	Kota Tangerang Selatan
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika</i>		
20	IP2MP Aripan	Kabupaten Solok
21	IP2MP Cukur Gondang	Kabupaten Pasuruan
22	IP2MP Sumani	Kabupaten Solok
23	IP2MP Kraton	Kabupaten Pasuruan
24	IP2MP Pandean	Kabupaten Pasuruan
25	IP2MP Wera/Subang	Kabupaten Subang
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias</i>		
26	IP2MP Cipanas	Kabupaten Cianjur
27	IP2MP Serpong	Kota Tangerang Selatan
28	IP2MP Segunung	Kabupaten Cianjur
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika</i>		
29	IP2MP Banaran	Kota Batu
30	IP2MP Banjarsari	Kabupaten Probolinggo
31	IP2MP Kliran	Kota Batu
32	IP2MP Punten	Kota Batu
33	IP2MP Tlekung	Kota Batu
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik</i>		
34	IP2MP Cibinong	Kabupaten Bogor
35	IP2MP Cicurug	Kabupaten Sukabumi
36	IP2MP Cikampek	Kabupaten Karawang
37	IP2MP Cimanggu	Kota Bogor
38	IP2MP Laing	Kota Solok
39	IP2MP Manoko	Kabupaten Bandung Barat
40	IP2MP Sukamulya	Kabupaten Sukabumi
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar</i>		
41	IP2MP Cahaya Negeri	Kabupaten Lampung Utara
42	IP2MP Gunung Putri	Kabupaten Cianjur
43	IP2MP Pakuwon	Kabupaten Sukabumi

No	Nama IP2MP	Lokasi
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat</i>		
44	IP2MP Asembagus	Kabupaten Situbondo
45	IP2MP Karangploso	Kabupaten Malang
46	IP2MP Muktiharjo	Kabupaten Pati
47	IP2MP Pasirian	Kabupaten Lumajang
48	IP2MP Sumberrejo	Kabupaten Bojonegoro
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma</i>		
49	IP2MP Kayuwatu	Kota Manado
50	IP2MP Kima Atas	Kota Manado
51	IP2MP Mapanget	Kabupaten Minahasa Utara
52	IP2MP Paniki	Kota Manado
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak</i>		
53	IP2MP Ciawi	Kabupaten Bogor
54	IP2MP Cicadas	Kabupaten Bogor
55	IP2MP Cilember	Kabupaten Bogor
56	IP2MP Pasir Jambu	Kabupaten Bogor
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk</i>		
57	IP2MP Taman Bogo	Kabupaten Lampung Timur
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian</i>		
58	IP2MP Jakenan	Kabupaten Pati
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa</i>		
59	IP2MP Banjarbaru	Kota Banjarbaru
60	IP2MP Balandan	Kabupaten Barito Kuala
61	IP2MP Binuang	Kabupaten Tapin
62	IP2MP Handil Manarap	Kabupaten Banjar
63	IP2MP Tanggul	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
64	IP2MP Tawar	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
<i>Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi</i>		
65	IP2MP Lanrang	Kabupaten Sidrap
66	IP2MP Bontobili	Kabupaten Gowa
<i>Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar</i>		
67	IP2MP Gratitunon	Kabupaten Pasuruan
68	IP2MP Sumberagung	Kabupaten Pasuruan
69	IP2MP Ciawi	Kabupaten Bogor
<i>Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil</i>		
70	IP2MP Sei Putih	Kabupaten Deli Serdang
71	IP2MP Bogor	Kota Bogor
<i>Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian</i>		
72	IP2MP Cipaku	Kota Bogor
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh</i>		
73	IP2MP Paya Gajah	Kabupaten Aceh Timur
74	IP2MP Gayo	Kabupaten Bener Meriah
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara</i>		
75	IP2MP Gurgur	Kabupaten Toba
76	IP2MP Pasar Miring	Kabupaten Deli Serdang
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat</i>		
77	IP2MP Bandar Buat	Bandar Buat, Kota Padang
78	IP2MP Rambatan	Rambatan, Kab. Tanah Datar
79	IP2MP Sitiung	Kabupaten Dharmasraya
80	IP2MP Sukarami	Kabupaten Solok
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau</i>		
81	IP2MP Kubang Jaya	Kabupaten Kampar
82	IP2MP Siak	Kabupaten Siak
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi</i>		
83	IP2MP Sungai Tiga	Kabupaten Muaro Jambi
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan</i>		
84	IP2MP Karang Agung	Kabupaten Banyuasin
85	IP2MP Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Nama IP2MP	Lokasi
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung</i>		
86	IP2MP Natar	Kabupaten Lampung Selatan
87	IP2MP Tegineneng	Kabupaten Lampung Selatan
88	IP2MP Masgar	Kabupaten Pesawaran
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten</i>		
89	IP2MP Singamerta	Kabupaten Serang
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat</i>		
90	IP2MP Pusakanagara	Kabupaten Subang
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah</i>		
91	IP2MP Batang	Kabupaten Batang
92	IP2MP Magelang	Kabupaten Magelang
93	IP2MP Ungaran	Kabupaten Semarang
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta</i>		
94	IP2MP Banyakan	Kabupaten Bantul
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur</i>		
95	IP2MP Karangploso	Kabupaten Malang
96	IP2MP Mojosari	Kabupaten Mojokerto
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat</i>		
97	IP2MP Sandubaya	Kabupaten Lombok Timur
98	IP2MP Poto Tano	Kabupaten Sumbawa Barat
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur</i>		
99	IP2MP Lili	Kabupaten Kupang
100	IP2MP Maumere	Kabupaten Sikka
101	IP2MP Naibonat	Kabupaten Kupang
102	IP2MP Waingapu	Kabupaten Sumba Timur
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara</i>		
103	IP2MP Pandu	Kabupaten Minahasa Utara
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah</i>		
104	IP2MP Sidondo	Kabupaten Sigi
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan</i>		
105	IP2MP Bone - Bone	Kabupaten Luwu Utara
106	IP2MP Gowa	Kabupaten Gowa
107	IP2MP Jeneponto	Kabupaten Jeneponto
108	IP2MP Luwu	Kabupaten Luwu Utara
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara</i>		
109	IP2MP Onembute	Kabupaten Konawe Selatan
110	IP2MP Wawotobi	Kabupaten Konawe
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo</i>		
111	IP2MP Tilong Kabila	Kabupaten Bone Bolango
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah</i>		
112	IP2MP Unit Tatas	Kabupaten Kapuas
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat</i>		
113	IP2MP Selakau	Kabupaten Sambas
114	IP2MP Simpang Monterado	Kabupaten Bengkayang
115	IP2MP Sungai Kakap	Kabupaten Kubu Raya
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur</i>		
116	IP2MP Lempake	Kota Samarinda
117	IP2MP Semboja	Kabupaten Kutai Kartanegara
118	IP2MP Bulungan (Kaltara)	Kabupaten Bulungan
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan</i>		
119	IP2MP Alabio	Kabupaten Hulu Sungai Utara
120	IP2MP Banjarbaru	Kota Banjarbaru
121	IP2MP Barabai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
122	IP2MP Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku</i>		
123	IP2MP Makariki	Kabupaten Maluku Tengah
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bangka Belitung</i>		
124	IP2MP Petaling	Kota Pangkal Pinang

No	Nama IP2MP	Lokasi
125	IP2MP Batu Betumpang	Kabupaten Bangka Selatan
126	IP2MP Gantung	Kabupaten Belitung Timur
127	IP2MP Koba	Kabupaten Bangka Tengah
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara</i>		
128	IP2MP Bacan	Kabupaten Halmahera Selatan
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat</i>		
129	IP2MP Luyo	Kabupaten Polewali Mandar
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua</i>		
130	IP2MP Jayawijaya	Kabupaten Jayawijaya
131	IP2MP Merauke	Kabupaten Merauke
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat</i>		
132	IP2MP Manokwari	Kabupaten Manokwari
133	IP2MP Sorong	Kabupaten Sorong
134	IP2MP Anday	Kabupaten Manokwari

AGRO MODERN

Lampiran 4. Nama dan Lokasi Laboratorium

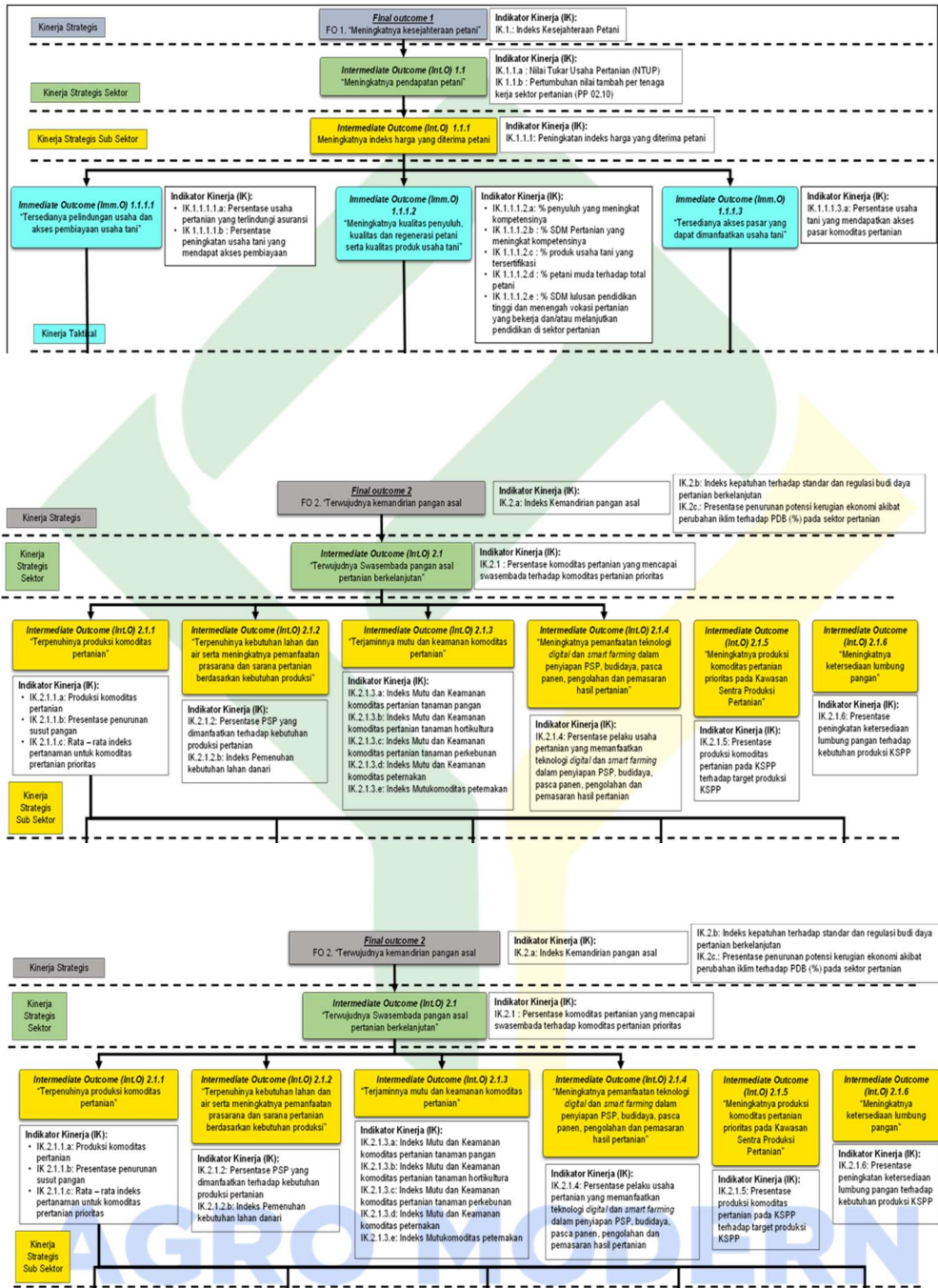
No	Nama Laboratorium	Lokasi
<i>Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi</i>		
1	Laboratorium Mutu Benih	Sukamandi, Jawa Barat
2	Laboratorium Mutu Fisik Gabah dan Beras	
3	Laboratorium Mutu Kimia	
4	Laboratorium Pemuliaan dan Genetika Tanaman Padi	
5	Laboratorium Hama dan Penyakit Padi	
6	Laboratorium Agro-Ekofisiologi Padi	
7	Laboratorium Pascapanen	
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang</i>		
8	Laboratorium Tanah dan Tanaman	Malang, Jawa Timur
9	Laboratorium Kimia Pangan	
10	Laboratorium Uji Mutu Benih	
11	Laboratorium Hama dan Penyakit	
12	Laboratorium Sentral	
13	Laboratorium Plasma Nutfah dan Pemuliaan	
14	Laboratorium Mikrobiologi Tanah	
15	Laboratorium Entomologi	
16	Laboratorium Bakteriologi	
17	Laboratorium Mekanisasi Pertanian	
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia</i>		
18	Laboratorium Pengujian Benih	Maros, Sulawesi Selatan
19	Laboratorium Bio Molekuler	
20	Laboratorium Hama dan Penyakit	
21	Laboratorium Pasca Panen	
22	Laboratorium Servis Kimia Tanah	
<i>Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi</i>		
23	Laboratorium Mikrobiologi	Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran</i>		
24	Laboratorium Benih	Lembang, Jawa Barat
25	Laboratorium Fisiologi Hasil	
26	Laboratorium Fisiologi Tanaman	
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika</i>		
27	Laboratorium Pemuliaan dan Kultur Jaringan	Solok, Sumatera Barat
28	Laboratorium Kimia dan Pasca Panen	
29	Laboratorium Produksi Benih	
30	Laboratorium Kultur Jaringan	
31	Laboratorium Uji Mutu	
32	Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman	Subang, Jawa Barat
33	Laboratorium Uji Mutu dan Molekuler	
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias</i>		
34	Laboratorium Bakteri dan Mikologi	Segunung, Pacet, Cianjur, Jawa Barat
35	Laboratorium Biokontrol	
36	Laboratorium Kultur jaringan KP. Cipanas	
37	Laboratorium Ekofisiologi	
38	Laboratorium Kultur jaringan KP. Serpong	
39	Laboratorium Pemuliaan Terpadu KP. Segunung (Molekuler)	
40	Laboratorium Pengembangan kultur jaringan KP. Segunung	
41	Laboratorium Plasma Nutfah	
42	Laboratorium Kultur Jaringan KP. Segunung	
43	Laboratorium UPBS	
44	Laboratorium Kultur Jaringan Anggrek	
45	Laboratorium Cipanas 2	

No	Nama Laboratorium	Lokasi
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika</i>		
46	Laboratorium Hama Penyakit	Batu, Jawa Timur
47	Laboratorium Pemuliaan dan Kultur jaringan	
48	Laboratorium Ekofisiologi	
49	Laboratorium Pasca Panen	
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik</i>		
50	Laboratorium Bioteknologi	Cimanggu, Jawa Barat
51	Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman	
52	Laboratorium Kimia dan Fisik	
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat</i>		
53	Laboratorium Uji Mutu Benih	Karangploso, Malang, Jawa Timur
54	Laboratorium Biologi Molekuler	
55	Laboratorium Kimia Tanaman	
56	Laboratorium Kultur Jaringan	
57	Laboratorium Tanah	
58	Laboratorium Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma</i>		
59	Laboratorium Ekofisiologi	Mapanget, Minahasa Utara, Sulawesi Utara
60	Laboratorium Pemuliaan/Benih	
61	Laboratorium Pengolahan Hasil/Pasca Panen	
62	Laboratorium Kultur Jaringan dan Molekuler	
63	Laboratorium Hama dan Penyakit	
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar</i>		
64	Laboratorium Tanah dan Tanaman	Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat
65	Laboratorium Kultur Jaringan	
66	Laboratorium Molekuler	
67	Laboratorium Hama Penyakit	
68	Laboratorium Lapang Bioenergi	
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak</i>		
69	Laboratorium Nutrisi dan Pakan	Ciawi, Bogor, Jawa Barat
70	Laboratorium Molekuler	
71	Laboratorium Servis/Kimia	
72	Laboratorium Reproduksi	
<i>Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner</i>		
73	Laboratorium Bakteriologi	Bogor, Jawa Barat
74	Laboratorium Bioteknologi/Laboratorium Terpadu	
75	Laboratorium BSL3 (Biosepty Level 3) (Zoonosis)	
76	Laboratorium Biosafety/Zoonosis	
77	Laboratorium Paramiko (Parasitologi dan Mikologi)	
78	Laboratorium Patologi	
79	Laboratorium Toksikologi	
80	Laboratorium Virologi	
<i>Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar</i>		
81	Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ternak	Grati, Pasuruan, Jawa Timur
82	Laboratorium Reproduksi Ternak	
83	Laboratorium Genetika Molekuler	
84	Laboratorium Kesehatan Hewan	
<i>Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil</i>		
85	Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ternak	Deli Serdang, Sumatera Utara
86	Laboratorium Reproduksi Ternak	
87	Laboratorium Genetika Molekuler	
88	Laboratorium Kesehatan Hewan	
<i>Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian</i>		
89	Laboratorium GIS (<i>Geographic Information System</i>)	Bogor, Jawa Barat
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa</i>		
90	Laboratorium Terpadu	Loktabat Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan

No	Nama Laboratorium	Lokasi
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk</i>		
91	Laboratorium Biologi dan Kesehatan Tanah	Bogor, Jawa Barat
92	Laboratorium Fisika Tanah	
93	Laboratorium Mineralogi Tanah	
94	Laboratorium Kimia Tanah	
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian</i>		
95	Laboratorium AgroHidromet	Bogor, Jawa Barat
<i>Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian</i>		
96	Laboratorium Gas Rumah Kaca	Jakenan, Pati, Jawa tengah
97	Laboratorium Logam Berat	
98	Laboratorium Pestisida	
<i>Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian</i>		
99	Laboratorium Biologi Molekuler	Bogor, Jawa Barat
100	Laboratorium Mutu Benih	
101	Laboratorium Biokimia	
102	Laboratorium Kultur Jaringan	
103	Laboratorium Mikrobiologi	
<i>Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian</i>		
104	Laboratorium Penanganan	Bogor, Jawa Barat
105	Laboratorium Fisik	
106	Laboratorium Kimia	
107	Laboratorium Mikrobiologi	
108	Laboratorium Nano Teknologi	
109	Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Sereal	Karawang, Jawa Barat
<i>Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian</i>		
110	Laboratorium Pengujian	Tangerang, Banten
111	Laboratorium Perakitan	
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh</i>		
112	Laboratorium Pengujian Tanah dan Tanaman	Banda Aceh, Aceh
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara</i>		
113	Laboratorium Pengujian Tanah dan Pupuk	Medan, Sumatera Utara
114	Laboratorium Kultur Jaringan	Balige, Sumatera Utara
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat</i>		
115	Laboratorium Pengujian	Solok, Sumatera Barat
116	Laboratorium Diseminasi	Padang, Sumatera Barat
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu</i>		
117	Laboratorium Bioteknologi Terapan	Kota Bengkulu, Bengkulu
118	Laboratorium Pasca Panen	
119	Laboratorium Pengujian	
120	Laboratorium Benih	
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau</i>		
121	Laboratorium Pengujian	Pekanbaru, Riau
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi</i>		
122	Laboratorium Pengujian Tanah dan Pupuk	Muaro Jambi, Jambi
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan</i>		
123	Laboratorium Tanah dan Mutu Beras	Palembang, Sumatera Selatan
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung</i>		
124	Laboratorium Pengujian	Natar, Lampung Selatan
125	Laboratorium Kultur Jaringan	
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat</i>		
126	Laboratorium Pengujian	Lembang, Jawa Barat
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta</i>		
127	Laboratorium Pengujian Mutu Benih	Daerah Khusus Jakarta
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah</i>		
128	Laboratorium Pengujian	Semarang, Jawa Tengah
129	Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman	
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta</i>		
130	Laboratorium Tanah	Sleman, Yogyakarta

No	Nama Laboratorium	Lokasi
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur</i>		
131	Laboratorium Diseminasi Wonocolo	Surabaya, Jawa Timur
132	Laboratorium Tanah	Malang, Jawa Timur
133	Laboratorium Kultur Jaringan	
134	Laboratorium Benih	
135	Laboratorium Pasca Panen	
136	Laboratorium Hama Penyakit	
137	Laboratorium Agronomi	
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat</i>		
138	Laboratorium Pengujian Tanah, Pupuk, dan Tanaman	Narmada, Lombok Barat, NTB
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur</i>		
139	Laboratorium Pengujian	Kupang, Nusa Tenggara Timur
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara</i>		
140	Laboratorium Pengujian Mutu Benih	Minahasa, Sulawesi Utara
141	Laboratorium Pengolahan Hasil	Kota Manado, Sulawesi Utara
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan</i>		
142	Laboratorium Pengujian Tanah, Pupuk, Tanaman dan Air	Maros, Sulawesi Selatan
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara</i>		
143	Laboratorium Mutu Produk Kakao dan Pengujian Tanah	Kendari, Sulawesi Tenggara
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah</i>		
144	Laboratorium Pengujian	Palangka Raya, Kalimantan Tengah
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo</i>		
145	Laboratorium Tanah dan Pupuk	Bone Bolango, Gorontalo
146	Laboratorium Benih	
147	Laboratorium Pasca Panen	
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah</i>		
148	Laboratorium Pengujian	Palangka Raya, Kalimantan Tengah
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat</i>		
149	Laboratorium Pengujian	Pontianak, Kalimantan Barat
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur</i>		
150	Laboratorium Pengujian Tanah, Pakan dan Pupuk	Samarinda, Kalimantan Timur
151	Laboratorium Diseminasi dan Sertifikasi Produk Pertanian	
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan</i>		
152	Laboratorium Pengujian Mutu Benih	Banjarmasin, Kalimantan Selatan
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten</i>		
153	Laboratorium Pengujian Mutu Beras	Serang, Banten
154	Laboratorium Diseminasi	
155	Laboratorium Teknologi Hasil	
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku</i>		
156	Laboratorium Pengujian Kimia Tanah	Ambon, Maluku
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara</i>		
157	Laboratorium Diseminasi	Tidore, Maluku Utara
158	Laboratorium Teknologi Hasil	
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat</i>		
159	Laboratorium Diseminasi	Kabupaten Polewali Mandar
160	Laboratorium Pasca Panen	
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua</i>		
161	Laboratorium Pendukung	Jayapura, Papua
<i>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat</i>		
162	Laboratorium Pengujian	Manokwari, Papua Barat

Lampiran 5. Pohon Kinerja BRMP



Lampiran 6. Perjanjian Kinerja BRMP 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Pertama


Fadjry Djufry

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Sertifikasi Usahatani Nasional	1.1. Persentase Usaha Tani Berbadan Hukum Yang Tersertifikasi	13,07	%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	2.1. Persentase Pelaku Usaha Pertanian Yang Memanfaatkan Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan	44,15	%
3	Terwujudnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian	3.1. Indeks Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian	4,00	Skala (1-4)
4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Baik, Transparan dan Akuntabel	4.1. Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	0,8000	Indeks (0-1)

Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
EC	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 164.570.254.000
7911	Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp 164.570.254.000
HA	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 47.015.422.000
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 47.015.422.000
WA	Dukungan Manajemen	Rp 735.488.635.000
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 735.488.635.000
		Rp 947.074.311.000

AGRO

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Pertama


Fadjry Djufry

Lampiran 7. Keputusan Kepala BRMP tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Mandiri Lingkup BRMP Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM

TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204

WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 972/Kpts/RC.050/H/08/2025

TENTANG

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MANDIRI
LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a bahwa untuk memastikan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim evaluasi mandiri guna memastikan pelaksanaan evaluasi berjalan efektif dan sesuai dengan pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mandiri lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts /OT.050 /08 /2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/KWSIWL.150/M/11/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Mandiri AKIP.

KETIGA : Tim Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari susunan keanggotaan sebagai berikut:

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- II. Ketua : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- Sekretaris : Ketua Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- Anggota Sekretariat Badan :
 1. Kepala Bagian Umum
 2. Ketua Kelompok Perencanaan
 3. Ketua Kelompok Keuangan dan BMN
 4. Ketua Kelompok Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
 5. Ketua Tim Kerja Program
 6. Ketua Tim Kerja Anggaran
 7. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
 8. Ketua Tim Kerja TURT
- BRMP Tanaman Pangan :
 1. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
 2. Ketua Tim Kerja Program
 3. Ketua Tim Kerja Evaluasi
- BRMP Tanaman Hortikultura :
 1. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
 2. Ketua Tim Kerja Program
 3. Ketua Tim Kerja Evaluasi
- BRMP Perkebunan :
 1. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
 2. Ketua Tim Kerja Program
 3. Ketua Tim Kerja Evaluasi

BRMP Peternakan dan Keswan	: 1. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi 2. Ketua Tim Kerja Program 3. Ketua Tim Kerja Evaluasi
BRMP Sumber Daya Lahan	: 1. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi 2. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
BRMP Mekanisasi Pertanian	: 1. Ketua Kelompok Program dan Perekayasaan Teknologi 2. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
BRMP Bioteknologi dan SDG	: 1. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi 2. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
BRMP Pascapanen	: 1. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi 2. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
BRMP Tanaman Padi	: 1. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi 2. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
BRMP Veteriner	: 1. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi 2. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
BRMP Penerapan	: 1. Ketua Kelompok Program, Evaluasi, dan Pengembangan Teknologi 2. Ketua Tim Kerja Program 3. Ketua Tim Kerja Evaluasi

- KEDUA : Tim Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun konsep Kontrak Kinerja, manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dan matrik *cascading* Level I.
 2. Mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Kontrak Kinerja dan manual IKU Level II.
 3. Menetapkan batasan level *cascading* IKU Level I ke Unit dibawahnya.
 4. Melakukan reviu kontrak Kinerja, manual IKU dan ketepatan *cascading* Level II dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan terhadap level yang lebih rendah.
 5. Menatausahakan dokumen Level I yang meliputi Kontrak Kinerja, manual IKU, matrik *cascading*, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perencanaan Kinerja dan pengukuran Kinerja.
 6. Mengkoordinasikan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Card (BSC)*.
 7. Menyusun konsep Renstra tingkat unit eselon I yang bersangkutan.
 8. Melakukan reviu atas Renstra unit Eselon II dan unit eselon III UPT lingkup eselon I yang bersangkutan.
 9. Menatausahakan dokumen Renstra unit Eselon II dan unit eselon III UPT lingkup eselon I yang bersangkutan.
 10. Menghitung Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Level I.
 11. Menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Level I.
 12. Mengkoordinasikan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja.

13. Mereviu hasil perhitungan NCKO Level II.
 14. Menatausahakan dokumen Level I yang meliputi NCKO dan LAKIN serta dokumen lainnya yang terkait dengan pelaporan Kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
 15. Menyusun format evaluasi silang LAKIN
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- KEEMPAT : Ketua Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Kerja Tim Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 kepada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- KEENAM : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kantor Pusat Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2025



KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,

EDJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 8. Manual IKU BRMP

Manual Indikator Sasaran Program 1				
SASARAN PROGRAM (SP) SP 1: Meningkatkan sertifikasi Usahatani Nasional				
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) IKSP 1: Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi (%)				
PENANGGUNG JAWAB IKP: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian			TARGET (t-1/baseline)	
			n/a (indikator baru)	
SATUAN IKP: %				
Target				
2025	2026	2027	2028	2029
13,07	28,76	30,72	53,59	55,00
DEFINISI				
<p>a. Presentase usahatani berbadan hukum yang tersertifikasi adalah ukuran proporsi usahatani berbadan hukum yang tersertifikasi dari total usahatani berbadan hukum binaan BRMP pada tahun berjalan.</p> <p>b. Tersertifikasi yang dimaksud adalah sertifikat/ tanda yang diberikan oleh Kepala BRMP kepada usahatani berbadan hukum binaan BRMP pada tahun berjalan dengan berdasarkan kriteria tertentu.</p> <p>c. Kriteria tertentu yang dimaksud pada poin b, ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon II teknis di lingkungan BRMP, sesuai dengan karakteristik dan lingkup pembinaan yang dilaksanakan.</p> <p>d. Usaha tani berbadan hukum dinyatakan tersertifikasi apabila telah tercantum dalam Keputusan Kepala BRMP tentang pemberian sertifikat atau tanda sertifikasi pada tahun berjalan.</p>				
BUKTI REALISASI			SUMBER DATA	
<p>1. Keputusan Kepala BRMP mengenai pemberian sertifikat/ tanda kepada usahatani berbadan hukum binaan BRMP pada tahun berjalan</p> <p>2. Surat Kepala Unit Eselon 2 teknis di lingkungan BRMP mengenai usulan usahatani yang akan diberikan sertifikat/ tanda.</p>			<p>1. Tim Kerja Hukum, Sekretariat BRMP</p> <p>2. Unit Eselon 2 teknis di lingkungan BRMP</p>	

LEVEL KINERJA: Kinerja Strategis Sub Sektor Pertanian
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU: Intermediate Outcome Level 2 (Skor: 0,3)
KLASIFIKASI/POLARISASI IKU: <i>Maximize</i>
<p>FORMULA/CARA MENGHITUNG:</p> $\%UBT = \frac{\Sigma UBT}{\Sigma UBbt} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p>%UBT = Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi</p> <p>ΣUBT = Jumlah usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi</p> <p>$\Sigma UBbt$ = Jumlah usaha tani berbadan hukum binaan BRMP pada tahun berjalan</p>
<p>CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah usahatani berbadan hukum binaan BRMP pada tahun berjalan 2. Ambil data jumlah usaha tani berbadan hukum binaan BRMP pada tahun berjalan yang telah menerima sertifikat atau tanda sertifikasi yang diterbitkan oleh Kepala BRMP. 3. Hitung Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi
<p>PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA</p> <p>Instrumen pengukuran kinerja disusun oleh Unit Eselon II teknis di lingkungan BRMP, sesuai dengan tugas, fungsi, dan karakteristik pembinaan usaha tani berbadan hukum yang menjadi kewenangannya.</p>
<p>PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA</p> <p>Unit Eselon II teknis di lingkungan BRMP.</p>
<p>UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA</p> <p>PPMP Tanaman Pangan, PPMP Hortikultura, PPMP Perkebunan, PPM Peternakan dan Kesehatan Hewan, BBPM Sumber Daya Lahan Pertanian, BBPM Mekanisasi Pertanian, BBPM Pasca Panen Pertanian, BBPM Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, BB Penerapan dan Modernisasi Pertanian, BBPM Padi, BBPM Veteriner.</p>
<p>CATATAN KHUSUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha tani berbadan hukum yang telah menerima sertifikasi pada tahun sebelumnya tidak dihitung kembali pada tahun pengukuran berikutnya. • Usaha tani berbadan hukum binaan BRMP pada tahun berjalan yang dijadikan pengukuran tidak boleh sama antar unit eselon 2. • Pengukuran dilakukan secara tahunan dan mencerminkan capaian sertifikasi usaha tani berbadan hukum binaan BRMP pada periode pelaporan.

AGRO MODERN

Manual Indikator Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM (SP)

SP 3: Meningkatnya pemanfaatan teknologi *digital*, *smart farming*, dan *modern* dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP 3: Persentase pelaku usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi *digital*, *smart farming*, dan *modern* dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (%)

PENANGGUNG JAWAB IKP:

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

TARGET (t-1/baseline)

44,15 %

SATUAN IKP: %

Target				
2025	2026	2027	2028	2029
44,15	44,50	44,75	45,00	45,25

DEFINISI

- Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan teknologi *digital*, *smart farming*, dan *modern* oleh pelaku usaha pertanian pada berbagai tahapan usaha tani, mulai dari penyiapan prasarana dan sarana produksi (PSP), budidaya, panen–pascapanen, pengolahan, hingga pemasaran pertanian.
- Pelaku usaha pertanian yang dimaksud adalah petani perorangan yang ada di basis data SIMLUHTAN.
- Teknologi yang dimaksud mencakup 4 ruang lingkup yaitu:
 - Varietas/ Galur Unggul
 - Alat dan Mesin Pertanian Modern
 - Sistem Informasi Pertanian
 - Teknologi Pertanian Modern
- Varietas/ Galur Unggul yang dimaksud adalah benih/ bibit tanaman maupun ternak yang telah dilepas secara resmi oleh Kementerian Pertanian.
- Alat dan Mesin Pertanian modern yang dimaksud adalah peralatan mekanisasi pertanian yang pengoperasiannya menggunakan sumber tenaga mesin (diesel, bensin atau listrik).
- Sistem Informasi Pertanian yang dimaksud adalah aplikasi, *platform digital*, atau sistem berbasis TIK yang dapat memuat informasi penting bagi pelaksanaan kegiatan pertanian, misalnya informasi cuaca dan iklim, kalender tanam, rekomendasi pemupukan, informasi harga dan pasar, *traceability*, serta sistem manajemen usaha tani, termasuk juga sistem informasi pendukung pemasaran.
- Teknologi Pertanian Modern yang dimaksud adalah teknologi sensor, *artificial intelligence*, *Internet of Things* (IoT), drone, otomatisasi irigasi, *precision agriculture*, teknologi pascapanen dan pengolahan modern.

BUKTI REALISASI	SUMBER DATA
Dokumen hasil sampling lapangan	Sekretariat BRMP dan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi
LEVEL KINERJA: Kinerja Strategis Sub Sektor Pertanian	
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU: <i>Proxy</i>	
JENIS/KUALITAS IKU: Intermediate Outcome Level 2 (Skor: 0,3)	
KLASIFIKASI/POLARISASI IKU: <i>Maximize</i>	
<p>FORMULA/CARA MENGHITUNG:</p> $\%PUT = \frac{\Sigma PUT}{\Sigma PU} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p>%PUT = Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Memanfaatkan Teknologi <i>Digital, Smart Farming, dan Modern</i></p> <p>ΣPUT = Jumlah Sample Pelaku Usaha Pertanian yang Memanfaatkan Teknologi <i>Digital, Smart Farming, dan Modern</i></p> <p>ΣPU = Jumlah Total Sample Pelaku Usaha Pertanian</p>	
<p>CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah sample Pelaku Usaha Pertanian yang Memanfaatkan Teknologi <i>Digital, Smart Farming, dan Modern</i>. 2. Ambil data jumlah total sample Pelaku Usaha Pertanian (Sumber data populasi: SIMLUHTAN). 3. Hitung Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Memanfaatkan Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern. 	
<p>PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA</p> <p>Sekretariat BRMP kelompok Perencanaan</p>	
<p>PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA</p> <p>Sekretariat BRMP kelompok Evaluasi dan Pelaporan</p>	
<p>UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA</p> <p>PPMP Tanaman Pangan, PPMP Hortikultura, PPMP Perkebunan, PPM Peternakan dan Kesehatan Hewan, BBPM Sumber Daya Lahan Pertanian, BBPM Mekanisasi Pertanian, BBPM Pasca Panen Pertanian, BBPM Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, BB Penerapan dan Modernisasi Pertanian, BBPM Padi, BBPM Veteriner.</p>	
<p>CATATAN KHUSUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pemanfaatan teknologi <i>digital, smart farming, dan modern</i> oleh pelaku usaha pertanian diukur dengan metode sampling. • Pelaku usaha pertanian dibatasi pada petani yang terdaftar di sistem informasi SIMLUHTAN. • Penentuan sample dan jumlah sample petani per provinsi dilakukan dengan metode <i>multi-stage cluster random sampling</i>, dengan kluster utama adalah Kecamatan dan kluster sekunder adalah petani. 	

Manual Indikator Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM (SP)

SP 2: Terwujudnya pelestarian sumber daya genetik pertanian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP 2: Indeks pelestarian sumber daya genetik pertanian (Indeks)

PENANGGUNG JAWAB IKP:

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

TARGET (t-1/baseline)

n/a (indikator baru)

SATUAN IKP: Indeks

Target				
2025	2026	2027	2028	2029
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

DEFINISI

Indeks pelestarian sumber daya genetik pertanian adalah ukuran untuk mengevaluasi keberhasilan upaya pelestarian sumber daya genetik pertanian pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI

1. Dokumen daftar aksesori sumber daya genetik pertanian yang tersedia dan terkelola pada Bank Gen, ruang koleksi/cold storage, atau kebun koleksi.
2. Dokumen rekapitulasi kondisi aksesori.
3. Dokumentasi sumber daya genetik pertanian yang tersedia dan terkelola.
4. Dokumentasi fasilitas pengelolaan sumber daya genetik pertanian.

SUMBER DATA

- Data pengelolaan sumber daya genetik pertanian diseluruh satuan kerja lingkup BRMP yang diolah oleh:
1. BBPM Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
 2. PPMP Tanaman Pangan
 3. PPMP Hortikultura
 4. PPMP Perkebunan
 5. PPM Peternakan dan Kesehatan Hewan
 6. BBPM Padi
 7. BBPM Veteriner
 8. BB Penerapan dan Modernisasi Pertanian

LEVEL KINERJA: Kinerja Strategis Sub Sektor Pertanian

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU: *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU: Intermediate Outcome Level 2 (Skor: 0,3)

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU: *Maximize*

AGRO MODERN

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

$$\text{IPSDGP} = \frac{\Sigma \text{SDGptl}}{\Sigma \text{SDGpts}} \times 100\%$$

Dimana:

IPSDGP = Indeks pelestarian sumber daya genetik pertanian

ΣSDGptl = Jumlah Sumber Daya Genetik Pertanian yang Terkelola

ΣSDGpts = Jumlah Sumber Daya Genetik Pertanian yang Tersedia

Dengan kriteria indeks: Indeks 1 (sangat rendah): 0% - 25%; 2 (rendah) : 26% - 50%; 3 (sedang) : 51% -75%; 4 (tinggi): 76% - 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Menghitung jumlah sumber daya genetik pertanian yang tersedia
2. Menghitung jumlah sumber daya genetik pertanian yang terkelola
3. Menghitung persentase sumber daya genetik tanaman pertanian yang terkelola terhadap sumber daya genetik tanaman pertanian yang tersedia
4. Menghitung indeks kelestarian sumber daya genetik pertanian

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BBPM Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BBPM Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA

BBPM Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

CATATAN KHUSUS

- Sumber daya genetik pertanian yang dinilai dalam indeks ini hanya yang tersedia dan dikelola pada Bank Gen, ruang koleksi/ *cold storage*, atau kebun koleksi yang dikelola satuan kerja BRMP.
- Sumber daya genetik pertanian tersedia adalah jumlah Sumber daya genetik yang terkoleksi di bank gen, ruang koleksi/cold storage, kebun koleksi.
- Sumber daya genetik pertanian terkelola adalah jumlah sumber daya genetik yang terejuvinsi, terkarakterisasi, terevaluasi, serta termanfaatkan untuk perakitan varietas unggul baru dan atau produksi benih.

AGRO MODERN

Manual Indikator Sasaran Program 4

SASARAN PROGRAM (SP)

SP 4: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP 4: Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Indeks)

PENANGGUNG JAWAB IKP:

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

TARGET

(t-1/baseline)

Indikator Baru

SATUAN IKP: Indeks

Target				
2025	2026	2027	2028	2029
0,8000	0,8005	0,801	0,8015	0,8020

DEFINISI

- Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian merepresentasikan tata kelola birokrasi di lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagai bagian yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
- Indeks tata kelola birokrasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian diukur berdasarkan 5 parameter meliputi :
 1. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP
 2. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP
 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP
 4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BRMP
 5. Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP
- Semakin tinggi indeks tata kelola birokrasi lingkup BRMP, maka semakin baik tata kelola birokrasinya serta semakin tinggi dukungan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

BUKTI REALISASI

Laporan hasil pengukuran indeks tata kelola birokrasi BRMP

SUMBER DATA

Sekretariat BRMP

AGRO MODERN

LEVEL KINERJA: Kinerja Strategis Sub Sektor Pertanian
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU: Intermediate Outcome Level 2 (Skor: 0,3)
KLASIFIKASI/POLARISASI IKU: <i>Maximize</i>
<p>FORMULA/CARA MENGHITUNG: FORMULA/CARA MENGHITUNG: Itakel = $(WTL\ 1\ x\ (TL\ 1/100)) + (WTL\ 2\ x\ (TL\ 2/100)) + (WIKPA\ x\ (IKPA/100)) + (WIKM\ x\ (IKM/4)) + (WLINT\ x\ (LINT/4))$ Dimana : -Itakel = Indeks tata kelola birokrasi BRMP -WTL 1= Bobot pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP (20%) -TL 1 = Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP -WTL 2= Bobot pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP (20%) -TL 2 = Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP -WIKPA= Bobot Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP (20%) -IKPA= Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP -WIKM= Bobot Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BRMP (20%) -IKM= Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BRMP -WLINT= Bobot kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP (20%) -LINT= Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP</p>
<p>CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP 2. Ambil data pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP 3. Ambil data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP 4. Ambil data Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BRMP 5. Ambil data kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP 6. Hitung indeks tata kelola birokrasi BRMP dengan formula diatas
<p>PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA Sekretariat BRMP</p>
<p>PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA Sekretariat BRMP</p>
<p>UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA Sekretariat BRMP</p>

AGRO MODERN

Lampiran 9. Matrik Renaksi BRMP

No	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak	Keterangan/ Evidence		
							Fisik	Persentase						
f	2	3	4	5	6	7	f0	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7
		Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyelesaian PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengaliran dan Pemasaran Hasil Pertanian	Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyelesaian PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengaliran dan Pemasaran Hasil Pertanian				B01: B02: B03: B04: B05: B06: B07: B08: B09: B10: B11:		0	14%	IKU baru sehingga pemahaman belum seragam	Diskusikan teknis dan penyamaan persepsi	Pemahaman IKU menjadi seragam	Notulen rapat, bahan diskusi
								0	28%	Belum tersedia acuan terdapat	Finalisasi dan pedoman pedoman	Pedoman menjadi acuan pelaksanaan	Manual IKU	
								0	42%	Risiko bias metode dan sampel	Penyempurnaan metode sesuai kaidah statistik	Metode valid dan akurat	Notulen rapat, bahan paparan, kesepakatan metode	
								0	56%	Risiko terbentarnya (tidak dipahami) responden	Uji keterbacaan dan penyederhanaan pertanyaan	Kuesioner siap diuji coba	Draft kuesioner	
								0	70%	Instrumen dan alat belum optimal	Penyempurnaan instrumen survei	Instrumen final siap digunakan	Laporan alat survei dokumentasi lengkap	
								0	84%	Pemahaman LPT masih beragam	Pengujian peran LPT dalam survei	LPT siap melaksanakan survei	Daftar hadir, materi sosialisasi	
								393 petani yang menggunakan 2 teknologi dengan syarat salah pelaksanaan survei KCPJ dan teknologi SIP atau teknologi modern dan total populasi survei 530 petani	100%	Keterbatasan waktu dan variasi kualitas data	Monitoring intensif dan verifikasi target	KOPJ mencapai 42,20% dengan target 44,10%	Survei pengisian, kuesioner, foto buku, database, laporan IKU	
3	1	Terwujudnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian	Indeks Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian (Indeks Skala 1-4)	(Indeks Skala 1-4)	4	BRMP Biogen	B01: B02: B03: B04: B05: B06: B07: B08: B09: B10: B11:	Indikator Indeks Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian belum diukur keberhasilannya pada B01 sampai dengan B11 karena pada periode tersebut indikator ini belum ditetapkan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Kepala BRMP						

**TABEL KENDALI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERAKTAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
(sampai dengan Desember tahun 2025)**

No	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak	Keterangan/ Evidence		
							Fisik	Persentase						
f	2	3	4	5	6	7	f0	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7
1	1	Meningkatnya sertifikasi Usahatani Nasional	Pertentase Usaha Tani Berbedan Hukum yang Tersertifikasi (%)	13,09	BRMP Perekuburan dan BRMP Penelesaian	B01: B02: B03: B04: B05: B06: B07: B08: B09: B10: B11: B12:	Indikator Pertentase Usaha Tani Berbedan Hukum yang Tersertifikasi (%) belum diukur keberhasilannya pada B01 sampai dengan B05 karena pada periode tersebut indikator ini belum ditetapkan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Kepala BRMP	0	14%	Data biarah lesat dan belum terintegrasi	Sinkronisasi data UK BRMP Perekuburan dan BRMP Penelesaian	Peta awal biarah lesat	Rekap data usahatani biarah lesat	
								0	28%	Tidak seluruh biarah memenuhi persyaratan awal	Seleksi biarah kriteria badan hukum dan biarah aktif	Daftar biarah proses final	Rekap penyesuaian biarah proses	
								0	42%	Variasi tingkat pemahaman standar di tingkat biarah	Sosialisasi penetapan kriteria dan indikator sertifikasi	Kriteria digunakan sebagai acuan penilaian	Edaran penetapan kriteria dan indikator sertifikasi	
								0	56%	Keterbatasan waktu dan asistensi lapangan	Pendampingan dan asistensi lapangan	Peningkatan kelengkapan biarah	Materi sosialisasi, dokumentasi dan daftar hadir	
								0	70%	Dokumen dan perangkat standar sebagai biarah belum lengkap	Perbaikan dokumen dan pendampingan teknis	Biarah layak disusunkan sertifikasi	Checklist verifikasi, dokumen legal dan teknis	
								0	84%	Perbedaan tingkat pemenuhan kriteria antar biarah	Klarifikasi dan verifikasi lapangan pemenuhan syarat sertifikasi	Ditetapkan biarah yang memenuhi syarat sertifikasi	Matrik pemebobotan dan berita acara hasil penilaian	
								10 biarah tersertifikasi	100%	Proses administrasi berjangka dan penandatanganan	Koordinasi penetapan pejabat penandatanganan, selektabilitas biarah serta monitoring proses administrasi	KOPJ tercapai 14,09% (10 dari 69 usahatani), melampaui target 13,07%	Nota dinas usulan sertifikasi dan sertifikasi kepala BRMP. Berikat nama 10 usaha tani biarah yang memperoleh sertifikasi adalah: 1. Selangan Ketompok Tani Sungai Tang Malmur 2. Kelang Pad Scotti 3. Kelompok Tani "Jang Jaya" 4. Nala de Coca "Salu" 5. Koperasi Anugerah Aren Banten Nusantara 6. Koperasi Produksi Petani Berkah Saahorra 7. CV. Marga Jaya (Merek jahitan bli kopi Bajawa "Bombora Coffee") 8. Koperasi Produksi (Branco Maju Bersama	
2	1	Meningkatnya Pemertanian	Meningkatnya Pemertanian Teknologi	44,16	Selanjutnya BRMP	B01:	Indikator Meningkatkan Pemertanian Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyelesaian PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengaliran dan Pemasaran Hasil Pertanian belum diukur keberhasilannya pada B01 sampai dengan B05 karena pada periode tersebut indikator ini belum							

No	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak	Keterangan/ Evidence			
							Fisik	Persentase							
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	
							B12	1) Pemetaan lokasi bank gen di penyusunan jangka pendek dan jangka panjang 2) Monitoring viabilitas biji 3) Daya kecambah 4) Prosesnya bi 4) Pengemasan dan penyimpanan biji hasil regenerasi 5) Pemeliharaan koleksi tanaman di bang gen dalam 6) Sterilisasi Kebudayaan lokal kultur koleksi tanaman di bank gen in vitro	4	100,00			KPI tercapai 100% dengan target indeks 4		
4	1	Terewujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian yang Baik, Transparan dan Akuntabel	1	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian (indeks Skala 0-1)	(Indeks Skala 0-1)	0,8	Saker Lingkup BRMP	B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12	Indikator Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Peraktan dan Modernisasi Pertanian belum dapat keberhasilannya pada B01 sampai dengan B11 karena pada periode tersebut indikator ini belum ditetapkan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Kepala BRMP.						
							B12	Terdianya dokumen tindak lanjut atas LSP Bjen dan BPK, Terlaksananya entri dan validasi realisasi fisik dan progres per Rencana Output pada Aplikasi SAKTI, pelaksanaan SKM, dan pelayanan dukungan manajemen kepada seluruh saker lingkup BRMP		0,941	117%			Capaian optimal	Laporan akhir RB



Jakarta, Desember 2025
Sekretaris Badan

Husnaili, M.P., M.Sc., Ph.D
NIP. 197309102001122001

AGRO MODERN

Lampiran 9. SOP Pengumpulan Data, SOP Penyiapan Bahan LKj, dan SOP Penyusunan LKj

SOP PENGUMPULAN DATA

 KEMENTERIAN PERTANIAN RI BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor SOP	894.18/OT.210/H.1/05/2023
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2025
	Tanggal Revisi	A
	Tanggal Efektif	Agustus 2025
	Disahkan oleh	Sekretaris Badan,  Husnain, MP., M.Sc., Ph.D. NIP. 19730102001122001
NAMA SOP	PENGUMPULAN DATA	



Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian	1. Mampu mengoperasikan komputer dan software tertentu 2. Memahami tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 3. Memahami proses penyusunan laporan
Keterkaitan :	Peralatan/perengkapan :
1. SOP Laporan Kegiatan Utama dan Output Utama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2. SOP Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3. SOP Pemantauan Program dan Kegiatan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 4. SOP Penyusunan LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 5. SOP Penyusunan Laporan Akhir 6. SOP Penyusunan Laporan Bulanan Kementerian Pertanian 7. SOP Laporan Kegiatan Utama dan Output Utama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 8. SOP Penyusunan Tindak Lanjut Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian 9. SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kinerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 10. SOP Laporan Kegiatan Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1. Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran 2. Komputer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Ketertiban waktu pengumpulan data dan validitas data sangat mempengaruhi kualitas laporan	Sistematika dan format penyusunan bahan sudah ditentukan

SOP PENGUMPULAN DATA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Standar Baku			Ket.	
		Teknisi	Kepala UK/UPT	Pelaksana	Ketua Tim Kerja Evalap	Ketua Kelompok Evalap	Sekretaris Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menginstruksikan pelaksana untuk melakukan identifikasi kebutuhan data								2 hari		
2.	Pelaksana :										
	a. Melakukan identifikasi kebutuhan data							Surat	1 hari	Surat	
	b. Menyiapkan surat Sekretaris Badan tentang permintaan data ke UK/UPT, dan mengajukan melalui Ketua Tim Kerja Evalap dan Ketua Kelompok Evalap							Surat	1 hari	Surat	
3.	Sekretaris Badan :										
	a. Menandatangani surat permintaan data kegiatan										
	b. Menginstruksikan Ketua Tim Kerja Evalap melalui Ketua Kelompok Evalap untuk segera menyampaikan surat tersebut kepada UK/UPT yang bersangkutan							Surat	1 jam	Surat	
4.	Ketua Tim Kerja Evalap menginstruksikan pelaksana untuk mengirimkan surat ke UK/UPT								10 menit	Surat	
5.	Kepala UK/UPT menyiapkan dan menyerahkan data kegiatan kepada Ketua Kelompok Evalap cq. Ketua Tim Kerja Evalap							Data	2 hari	Data	
6.	Ketua Tim Kerja menginstruksikan kepada pelaksana untuk mengkompilasi dan mengolah data kegiatan dari UK/UPT							Data	5 hari	Data hasil olahan	
7.	Pelaksana :										
	a. Melakukan pengecekan/validasi data ke teknis di UK/UPT							Validasi	1 hari	Data hasil validasi	
	b. Melakukan penyajian data akhir dan entry data ke dalam database dan melaporkan ke Ketua Tim Kerja Evalap							Data hasil validasi	1 hari	Database	
8.	Hasil database final							Selesai			
Total waktu yang diperlukan									13 hari 1 jam 10		

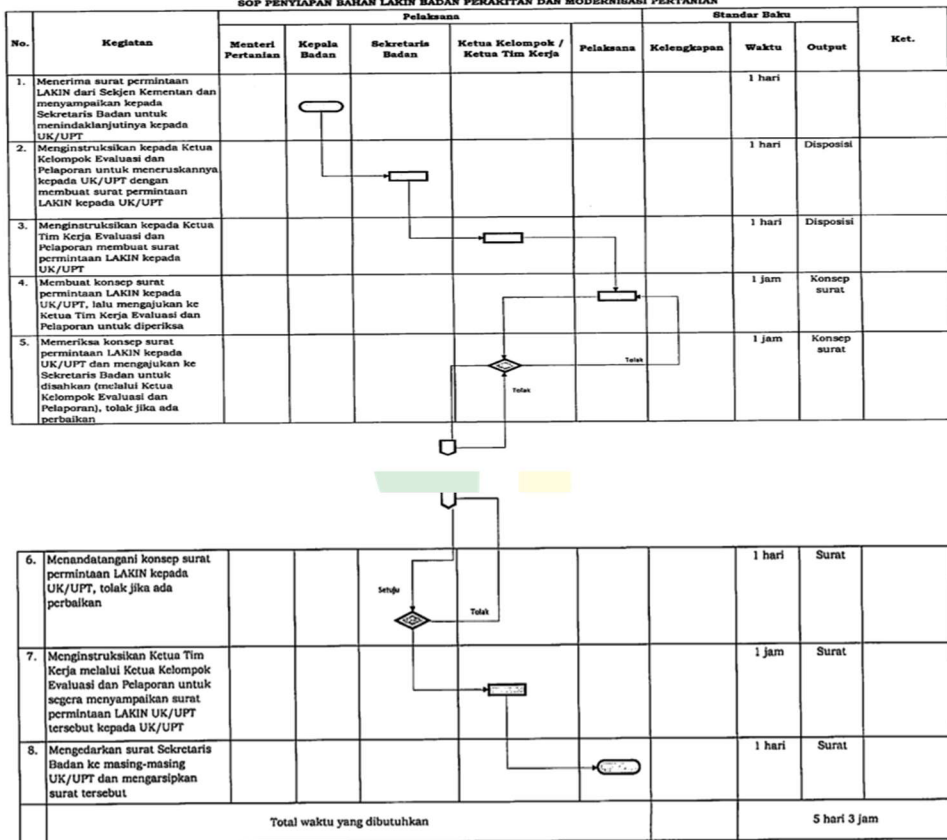
AGRO MODERN

SOP PENYIAPAN BAHAN LAKIN


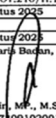
 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN RI</p> <p>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</p> <p>SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</p>	Nomor SOP : 894.3/OT/10/H.1/08/2025 Tanggal Pembuatan : Agustus 2025 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Agustus 2025 Disahkan oleh : Sekretaris Badan,  Husnain, MP, M.Sc, Ph.D NIP. 197304102001122001 NAMA SOP : PELAKSIAN BAHAN LAKIN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
--	---

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian 10. Rencana Strategis DRMP Tahun 2025-2029	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami prinsip-prinsip penyusunan LAKIN 2. Memahami pengukuran kinerja 3. Memahami rencana strategis Badan Perakitan dan Modernisasi 4. Memahami tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi
Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan LAKIN Unit Kerja 2. SOP Penyusunan Laporan Akhir 3. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	Peralatan/perengkapan : 1. Rencana kerja 2. Perjanjian kinerja 3. LAKIN UK dan UPT 4. Realisasi keuangan 5. Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 6. Laporan keuangan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 7. Laporan akhir kegiatan
Peringatan : 1. Apabila LAKIN Unit Kerja terlambat diserahkan, maka berakibat terlambatnya penyusunan LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2. Keterlambatan penyerahan LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka akan mendapatkan peringatan dari Biro Perencanaan, Setjen Kementan	Pencatatan dan Pendataan : 1. Sistematis laporan sudah ditentukan 2. Formulir laporan

SOP PENYIAPAN BAHAN LAKIN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN



SOP PENYUSUNAN LAKIN

 KEMENTERIAN PERTANIAN RI BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor SOP : 894.4/OT.210/11.1/08/2025 Tanggal Pembuatan : Agustus 2025 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Agustus 2025 Disahkan oleh : Sekretaris Badan,  Husnair, M.P., M.Sc, Ph.D NIP 197809102001122001 NAMA SOP : PEYUSUNAN LAKIN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
--	---

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian 10. Rencana Strategis BRMP Tahun 2025-2029	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami prinsip-prinsip penyusunan LAKIN 2. Memahami pengukuran kinerja 3. Memahami rencana strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 4. Memahami tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan LAKIN Unit Kerja 2. SOP Penyusunan Laporan Akhir 3. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	Peralatan/perengkapan : 1. RKT 2. Penetapan kinerja 3. LAKIN unit kerja 4. Realisasi keuangan 5. Rencana strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 6. Laporan keuangan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 7. Laporan akhir kegiatan
Peringatan : 1. Apabila LAKIN Unit Kerja terlambat diserahkan, maka berakibat terlambatnya penyusunan LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2. Keterlambatan penyerahan LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka akan mendapatkan peringatan dari Kantor Kementerian Pertanian	Pencatatan dan Pendataan : 1. Sistematis laporan sudah ditentukan 2. Formulir laporan

SOP PENYUSUNAN LAKIN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana						Standar Baku		Ket.	
		Kapoksi I PE	Pelaksana	Katimker Evalap	Kapoksi Evalap	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Biro Perencanaan Kementerian Pertanian	Kelengkapan		Waktu
1.	Sekretaris Badan menerima LAKIN UK/UPT dan menyerahkannya kepada Katimker. Evalap melalui Kapoksi Evalap untuk ditindaklanjuti								1 hari	LAKIN UK/UPT	
2.	Katimker Evalap mengarahkan kepada pelaksana untuk menyusun draft LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian								14 hari	Draft LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi	
3.	Katimker Evalap mengecek draft LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian untuk diserahkan kepada Kapoksi Evalap								1 hari		
4.	Kapoksi Evalap memerintahkan Katimker Evalap membuat undangan Sekretaris Badan untuk mengundang Kapoksi yang membidangi Program dan Evaluasi dalam rangka konsolidasi LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian								1 hari		
5.	Katimker Evalap melalui Pelaksana membuat surat tersebut dan diuskan ke Kapoksi Evalap untuk mendapatkan tanda tangan Sekretaris Badan								1 hari	Surat	
6.	Surat yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Badan dikirim kepada Kepala UK/UPT								1 hari		
7.	Hasil konsolidasi LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang sudah disetujui oleh Kapoksi PE UK/UPT diajukan kepada Sekretaris Badan								5 hari		
8.	Sekretaris Badan mengecek draft LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan menyerahkannya kepada Kepala Badan								1 hari		
9.	Kepala Badan menandatangani draft LAKIN serta menyerahkannya kembali kepada Sekretaris Badan untuk disampaikan kepada Katimker Evalap melalui Kapoksi Evalap								Surat pengantar	1 hari	LAKIN Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
10.	Katimker Evalap menyerahkan LAKIN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian kepada Pelaksana untuk dicetak dan menyerahkannya pada Menteri Pertanian cq Biro Perencanaan Kementerian Pertanian								1 hari		
Total waktu yang dibutuhkan									27 hari		

Lampiran 10. Daftar Usaha Tani Binaan Lingkup BRMP 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
1	BRMP Perkebunan	Gabungan Kelompok Tani Sungai Talang Makmur	Gabungan Kelompok Tani	Kakao	Nagari Sungai Talang, Kec. Guguk, Kab. Limapuluh Kota, Prov Sumatera Barat	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 49/Kpts/KB.020/E/06/2025 tentang Perubahan kedua atas Kepmentan Nomor 25/Kpts/KB.020/2017 tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman kakao	Pendampingan penetapan kebun sumber benih kakao klon BL50
2	Sumut	Kilang Padi Siputri	NIB	Beras	Desa Celawan, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai.	SNI 6128:2020	Pelatihan dan Pendampingan Penerapan SNI 6128:2020 Beras.
3	BRMP Riau	Kelompok Tani "Jang Jaya"	Kelompok Tani	Kopi Bubuk Merk My Limer Coffee	Jl. Parit Jang RT/RW 02/01 Dusun Parit Jang, Desa Kedaburapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti	SNI 8964:2021 (Kopi sangrai dan kopi bubuk)	Pendampingan dari BRMP Riau pada tanggal 23 Oktober 2025 untuk monitoring penerapan SNI SNI 8964:2021
4	BRMP Riau	Nata de Coco "Salju"	PT Perseorangan	Olahan Kelapa	Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.	SNI 01-4317-1996 tentang Nata de Coco	Sosialisasi SNI 01-4317-1996 tentang Nata de Coco oleh BSN dan BRMP Riau
5	BRMP Banten	Koperasi Anugerah Aren Banten Nusantara	Koperasi	Gula Aren Semut dan Minuman Serbuk Rempah	Munjul, Pandeglang, Banten	BPOM, SNI Bina UMK	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pengolahan Gula Aren Sesuai SNI • Pelatihan Good Hygiene Practices (GHPs) & Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) • Pelatihan agroforesti komoditas gula aren • Pelatihan pengolahan HHBK gula aren • Pembinaan pemeriksaan kesehatan koperasi
6	BRMP Gorontalo	Koperasi Produsen Sukma Melati Hutabohu	Koperasi, Sesuai Kepmen Hukum dan	Pupuk Organik Padat	Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten	SNI 7763:2018, SNI Pupuk Organik Padat	Pelatihan Penguatan Korporasi Petani dan Bisnis diselenggarakan

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
			HAM No: AHU-0003815. AH.01.29. TAHUN 2022		Gorontalo, Provinsi Gorontalo		oleh Kementerian Pertanian pada November Tahun 2025 di Hotel Aston Gorontalo
7	BRMP Maluku Utara	Budidaya dan Pasca panen Pala Organik	Pelaku Utama: Kelompok Tani (Poktan) Mirimoi; Pelaku Usaha: Koperasi Jasa Pengolahan Komoditi Perkebunan Dokono	Pala	Desa Simau, Kec. Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utar	Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik	Updating Data Untuk Inspeksi Internal di Lapangan secara Mandiri
8	BRMP Penerapan	Koperasi Produksi Petani Berkah Sejahtera	Koperasi	Padi dan kelapa sawit	Desa Sungai Pangkalan I, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan benih bermutu 2. Pengolahan lahan terstandar 3. Penanaman presisi 4. Pemupukan berimbang dan tepat sasaran 5. Pengelolaan air irigasi efisien 6. Pengendalian OPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan benih bermutu 2. Pengolahan lahan terstandar 3. Penanaman presisi 4. Pemupukan berimbang dan tepat sasaran 5. Pengelolaan air irigasi efisien 6. Pengendalian OPT Peningkatan kapasitas perkoperasian dan 7. Manajemen kelembagaan Ekonomi Kawasan pertanian kepada Pengurus anggota dan penyuluh pendamping.
9	BRMP Nusa Tenggara Timur	CV. Magna Jaya (Merkolahan biji kopi Bajawa "Sombra Coffee")	CV	Kopi	Kelurahan Liliba, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT.	SNI 8964:2021 tentang Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan penerapan standar peningkatan mutu produk tahun 2025 • Sistem Manajemen Mutu SNI/ISO 9001:2015 • Sosialisasi SNI 8964:2021 tentang Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk
10	BRMP Lampung	Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama	Koperasi	Kopi, Pupuk	Dusun Sidorejo Pekon Ngarip Kecamatan Ulubelu,	• GAP Kopi	• Pengolahan Kopi dan Pembuatan

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
					Kabupaten Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> SOP Usaha Pupuk Anorganik 	<ul style="list-style-type: none"> Pupuk Organik Cair Sekolah Lapang GHP (Good Handling Practices) Kopi Mengenai Sortasi dan Grading Visit Remora farm Pendampingan pengembangan rencana bisnis koperasi produsen srikandi maju bersama kec. Ulubelu

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
1	BRMP Perkebunan	Gabungan Kelompok Tani Sungai Talang Makmur	Gabungan Kelompok Tani	Kakao	Nagari Sungai Talang, Kec. Guguk, Kab. Limapuluh Kota, Prov Sumatera Barat	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 49/Kpts/KB.020/E/06/2025 tentang Perubahan kedua atas Kepmentan Nomor 25/Kpts/KB.020/2017 tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman kakao	Pendampingan penetapan kebun sumber benih kakao klon BL50
2	BRMP Aceh	Bungong Jaroe Riting	Badan Usaha Milik Desa	Janeng (Gadung)	Desa Riting, kecamatan Indrapuri, kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh	SNI 01-4306-1996 tentang Keripik Ubi Jalar	Pendampingan oleh BRMP Aceh terkait penerapan standar kemasan produk
3	BRMP Sumut	Kilang Padi Siputri	NIB	Beras	Desa Celawan, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai.	SNI 6128:2020	Pelatihan dan Pendampingan Penerapan SNI 6128:2020 Beras.
4	BRMO Sumbarr	Kelompok Tani Inovasi	Kelompok Tani	Kakao	Jorong Belubus Nagari Sungai Talang Kec.Guguak Kab.Lima Puluh Kota	SNI 2323:2008 Amd 1 2010 tentang biji kakao	Pelatihan Okulasi benih tanaman kakao Pelatihan pengolahan Kakao
5	BRMP Sumbarr	Kelompok Tani Mandiri	Kelompok Tani	Kakao	Jorong Belubus Nagari Sungai Talang Kec.Guguak Kab.Lima Puluh Kota	SNI 2323:2008 Amd 1 2010 tentang biji kakao	Pelatihan Okulasi benih tanaman kakao Pelatihan pengolahan Kakao
6	BRMP Sumbarr	Kelompok Tani Sejahtera	Kelompok Tani	Kakao	Jorong Belubus Nagari Sungai Talang Kec.Guguak Kab.Lima Puluh Kota	SNI 2323:2008 Amd 1 2010 tentang biji kakao	Pelatihan Okulasi benih tanaman kakao Pelatihan pengolahan Kakao
7	BRMP Riau	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kopi Bubuk	Jl. Parit Jang RT/RW 02/01	SNI 8964:2021 (Kopi sangrai dan kopi bubuk)	Pendampingan dari BRMP Riau pada

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
		"Jang Jaya"		Merk My Limer Coffee	Dusun Parit Jang, Desa Kedaburapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti		tanggal 23 Oktober 2025 untuk monitoring penerapan SNI SNI 8964:2021
8	BRMP Riau	Nata de Coco "Salju"	PT Perseorangan	Olahan Kelapa	Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.	SNI 01-4317-1996 tentang Nata de Coco	Sosialisasi SNI 01-4317-1996 tentang Nata de Coco oleh BSN dan BRMP Riau
9	BRMP Jambi	Kelompok Tani Selang Rengas	-	Benih Padi	Dusun Pulau Pinang, RT 01, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi	1. SNI 8969:2021 - Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik 2. SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida 3. SNI 7331:2021: Ketentuan Gudang Komoditas Pertanian.	1. Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
10	BRMP Bengkulu	Brigade Pangan Tunas Muda	Brigade Pangan	Padi	Desa Sari Mulyono, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma	SNI 9356:2025 Benih Padi Sehat	Bimtek PTT Padi Sawah dan Produksi Benih Padi Sehat
11	BRMP Bengkulu	Kelompok Tani Padang Segaro	Kelompok Tani	Padi	Desa Dusun Baru 2, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara	Kepmentan Nomor 966 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida	Sosialisasi Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Padi
12	BRMP Babel	Gapoktan Hikmah Tani	Gapoktan	Padi	Banyuasin, Riauasilip, Bangka, Babel	GAP Budidaya Padi Sawah	Budidaya Padi Sawah
13	BRMP Babel	Kimak Bahrin Lestari	Gapoktan	Padi	Kimak, Merawang, Bangka, Babel	GAP Budidaya Padi Sawah	Budidaya Padi Sawah
14	BRMP Kepulauan Riau	Karya Tani Jaya	<u>Kelompok Tani</u>	Padi	Bintan Timur, Kabupaten Bintan	1. SNI 8969:2021 Indonesian Good Agriculture Practices (IndoGAP) - Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik	1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Pendamping Mendukung Program Swasembada Pangan di Kabupaten Bintan 2. Pendampingan Program Pengembangan Padi Lahan Kering pada Lahan Perkebunan dan Lahan Kering Lainnya Tahun 2025 di Kepulauan Riau (Swadaya Petani)
15	BRMP Lampung	Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama	Koperasi	Kopi, Pupuk	Dusun Sidorejo Pekon Ngarip Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus	• GAP Kopi • SOP Usaha Pupuk Anorganik	• Pengolahan Kopi dan Pembuatan Pupuk Organik Cair • Sekolah Lapang GHP (Good Handling Practices) Kopi Mengenai Sortasi dan Grading • Visit Remora farm

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
							<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan pengembangan rencana bisnis koperasi produsen srikandi maju bersama kec. Ulubelu
16	BRMP Banten	Koperasi Anugerah Aren Banten Nusantara	Koperasi	Gula Aren Semut dan Minuman Serbuk Rempah	Munjul, Pandeglang, Banten	BPOM, SNI Bina UMK	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Pengolahan Gula Aren Sesuai SNI - Pelatihan Good Hygiene Practices (GHPs) & Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) - Pelatihan agroforesti komoditas gula aren - Pelatihan pengolahan HHBK gula aren - Pembinaan pemeriksaan kesehatan koperasi
17	BRMP DKI Jakarta	Sejahtera Makmur	Poktan (ID 588557)	Bibit Alpukat Cipedak	Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, Jakarta Selatan	Standar Perbenihan Alpukat	Pendampingan diseminasi bibit alpukat cipedak
18	BRMP DKI Jakarta	Jawa Indah	Poktan (ID Poktan 30532)	Padi	Kecamatan Kalideres, Kelurahan Semanan, Jakarta barat	SNI 8969:2021 IndoGAP	Bimtek budidaya padi spesifik Jakarta
19	BRMP Jabar	Koperasi Produsen Horti Agro Makmur	Usaha Tani Budidaya Kentang dengan penerapan teknologi GAP dan GHP, Badan Hukum Nomor AHU-0000798. AH.01.29. Tahun 2024	Kentang	Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Penerapan GAP dan GHP Kentang	Bimbingan Teknis dan demplot
20	BRMP Jabar	Koperasi Produsen Cikajang Agro Prakarsa	Usaha Tani Budidaya Kentang dengan penerapan teknologi GAP dan GHP, Badan Hukum Nomor AHU-0000802. AH.01.29.	Kentang	Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Penerapan GAP dan GHP Kentang	Bimbingan Teknis dan demplot

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
			Tahun 2024				
21	BRMP Jabar	Koperasi Produsen Putra Cisirupan Berdaya	Usaha Tani Budidaya Kentang dengan penerapan teknologi GAP dan GHP, Badan Hukum Nomor AHU-0000797. AH.01.29. Tahun 2024	Kentang	Kecamatan Cisirupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Penerapan GAP dan GHP Kentang	Bimbingan Teknis dan demplot
22	BRMP Jabar	Koperasi Produsen Sukaresmi Mulus Rayahu	, Badan Hukum Nomor AHU-0000800. AH.01.29. Tahun 2024	Kentang	Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Penerapan GAP dan GHP Kentang	Bimbingan Teknis dan demplot
23	BRMP Jawa Barat	Koperasi Produsen Eptilu Membangun Indonesia	Usaha Tani Budidaya Kentang dengan penerapan teknologi GAP dan GHP, Badan Hukum Nomor AHU-0007762. AH.01.26. Tahun 2021	Kentang	Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Penerapan GAP dan GHP Kentang	Bimbingan Teknis dan demplot
24	BRMP Jawa Barat	Koperasi Produsen Peternak Cikal Maju	Usaha Tani Penggemukan dan Pembibitan Domba dengan penerapan teknologi GFP, Badan Hukum Nomor AHU-0000801. AH.01.29. Tahun 2024	Ternak Domba	Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Penerapan GFP Domba	Bimbingan Teknis dan demplot
25	BRMP Jawa Barat	Koperasi Produsen Multi Pihak Rasana	Usaha Tani Penggemukan dan Pembibitan	Ternak Domba	Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Penerapan GFP Domba	Bimbingan Teknis dan demplot

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
		Rasyidah Mandiri	n Domba dengan penerapan teknologi GFP, Badan Hukum dengan Nomor AHU-0002106. AH.01.27. Tahun 2021				
26	BRMP Jawa Barat	Brigade Sri Unggul	Usaha Tani padi, ID Poktan 5085249	Padi	Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Penerapan GAP dan GHP Padi	Bimbingan Teknis dan demplot
27	BRMP D.I Yogyakarta	Kelompok Wanita Tani SARI RASA	NIB	Olahan Pisang	Babakan Cirawada RT 03/RW 03 Losari Brebes	SNI 01-4315-2009	VUB Pisang Hasil Kultur Jaringan, SOP Kebun Pisang Terstandar, Pembuatan Keripik Pisang Varian Rasa dan Es Krim Pisang
28	BRMP Jawa Tengah	aNAK AKUB	Asosiasi	Ayam KUB	Tingkir, Salatiga, Jateng	SNI 8405-1: 2017 Kuri Ayam KUB 1	-
29	BRMP Jawa Timur	KA. Barokah	Perusahaan Perorangan (Non Badan Hukum)	Hortikultura (Keripik Buah & Sayur)	Kampung Anyar RT.02/RW.01, Desa Sukolilo, Kec. Jabung, Kab. Malang, Jawa Timur	Sertifikasi HACCP	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan CCPOB • Pelatihan Keamanan Pangan
30	BRMP Jawa Timur	Sri Tanjung	Perusahaan Perorangan (Non Badan Hukum)	Hortikultura (Minuman Serbuk Instan Tradisional)	Dusun Mangi RT.04/RW.05, Desa Sukosari, Kec. Kasembon, Kab. Malang, Jawa Timur	Sertifikasi HACCP	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan CCPOB • Pelatihan Keamanan Pangan • Pelatihan Awareness HACCP
31	BRMP Bali	Koperasi Produsen Tani Kini Dharma Kriya	Koperasi	kopi arabika	desa Belantih kecamatan Kintamani kabupaten Bangli provinsi Bali	SNI-01-2007-2008 tentang biji kopi	bimbingan teknis penerapan SNI 01-2007-2008 tentang biji kopi dan SNI Bina UMK
32	BRMP Nusa Tenggara Timur	CV. Magna Jaya (Merk olahan biji kopi Bajawa "Sombra Coffee")	CV	Kopi	Kelurahan Liliba, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT.	SNI 8964:2021 tentang Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan penerapan standar peningkatan mutu produk tahun 2025 - Sistem Manajemen Mutu SNI/ISO 9001:2015 - Sosialisasi SNI 8964:2021 tentang Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk
33	BRMP Nusa Tenggara Barat	Koperasi Ngarat Jaya Usaha	Koperasi	Jagung dan Ayam Kampung	Desa Bunut Baik, Praya, Lombok Tengah, NTB	Standar/ GAP Budidaya Ayam Kampung Unggul	<ul style="list-style-type: none"> - Standar/GAP Budidaya Ayam Kampung - Pemanfaatan Bahan Lokal Sebagai Pakan ternak Alternatif

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Diiikuti Tahun 2025
							Ayam Kampung - Standar Penanganan Kesehatan hewan ternak ayam Kampung - Standar pembuatan pakan alternatif untuk ayam kampung
34	BRMP Nusa Tenggara Barat	Koperasi Petani Peternak Modern	Koperasi	Jagung dan Ayam Kampung	Desa Panji Sari, Praya, Lombok Tengah, NTB	Standar/ GAP Budidaya Ayam Kampung Unggul	- Standar/GAP Budidaya Ayam Kampung - Pemanfaatan Bahan Lokal Sebagai Pakan ternak Alternatif Ayam Kampung - Standar Penanganan Kesehatan hewan ternak ayam Kampung - Standar pembuatan pakan alternatif untuk ayam kampung
35	BRMP Nusa Tenggara Barat	Koperasi Makmur Aman Sejahtera	Koperasi	Ayam Kampung	Desa Jago, Praya, Lombok Tengah, NTB	Standar/ GAP Budidaya Ayam Kampung Unggul	- Standar/GAP Budidaya Ayam Kampung - Pemanfaatan Bahan Lokal Sebagai Pakan ternak Alternatif Ayam Kampung - Standar Penanganan Kesehatan hewan ternak ayam Kampung - Standar pembuatan pakan alternatif untuk ayam kampung
36	BRMP Nusa Tenggara Barat	UD. Rempah Organik Lombok = Muhir	UD	Vanili Organik	Dewe Some, Sakra, Lombok Timur, NTB	Standar Budidaya Vanili Organik (Standar USDA- Amerika Serikat)	- Standar Budidaya Vanili Organik - Standar Pengendalian OPT Pada tanaman Vanili Organik
37	BRMP Nusa Tenggara Barat	Asosiasi Petani Vanili Organik Lombok Indonesia = Rusian	Asosiasi	Vanili Organik	Semalun, Lombok Timur, NTB	Standar Budidaya Vanili Organik (Standar USDA- Amerika Serikat)	- Standar Budidaya Vanili Organik - Standar Pengendalian OPT Pada tanaman Vanili Organik
38	BRMP Nusa Tenggara Barat	Koperasi Maju Mandiri Modern (3M)	Koperasi	Jagung	Tanak Rarang	Jagung hibrida	• Standar Produksi Benih Jagung Hibrida
39	BRMP Nusa Tenggara Barat	PB Sari Makmur	Produsen Benih Tanaman Pangan dengan Nomor: 120 PBNTB-	Padi inbrida dan kedelai	Jln Sunan Sudar Kebon Jaya Barat, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram	1. Penggunaan Benih Unggul berlabel dan bersertifikat sejak tahun 2015. 2. Menerapkan benih unggul terbaru (BK, Pajajaran, Situbondo) di tahun 2025 dengan provitas	* Mengikuti Pelatihan Perbenihan di Bogor, Jawa Barat. * Mengikuti Bimtek Perbenihan & Teknologi Produksi Benih Padi oleh

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
			01/VI/2015			tinggi. 3. Melaksanakan rekomendasi pemupukan sesuai kebutuhan tanaman. 4. Melaksanakan Sistem Tanam Jajar Legowo.	BRMP NTB. * Penangkar Padi untuk Pulau Sumbawa & Lombok (Luas 100 ha, Produksi 800 ton/tahun). * Membina banyak kelompok tani dengan sistem kerjasama UD Sari Makmur.
40	BRMP Nusa Tenggara Barat	Poktan Adu Nasib	POKTAN 11/Skbl/Pan/Distanluh/2022	Padi	Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram	1. Penggunaan benih unggul berlabel dan bersertifikat sejak 2014. 2. Menggunakan benih Inpari 49 Jember dan Inpari 32; kerjasama penangkaran dengan UPBS BRMP NTB tahun 2025. 3. Pemupukan sesuai rekomendasi kebutuhan tanaman. 4. Sistem Tanam Jajar Legowo (2:1 dan 4:1). 5. Pengendalian HPT sesuai rekomendasi.	* Pelatihan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTB. * Bimtek Produksi Benih Padi dan GAP Standar Budidaya Padi oleh BRMP NTB. * Pelatihan Pengendalian Hama oleh Bapeltabun Provinsi.
41	BRMP Nusa Tenggara Barat	PB Temas Sejahtera, Narmada Kab Lombok Barat, NTB	Produsen Benih Tanaman Pangan dengan Nomor: 224/PB/NTB-02/IX/2015	Padi	Narmada, Lombok Barat, NTB	1. Penggunaan Benih Unggul berlabel dan bersertifikat sejak tahun 2015. 2. Menerapkan benih unggul terbaru (Inpari 49 Jember). 3. Kerjasama penangkaran dengan UPBS BRMP NTB tahun 2025 dengan provitas tinggi dan pembinaan kelompok tani anggota. 4. Melaksanakan rekomendasi pemupukan sesuai kebutuhan tanaman. 5. Melaksanakan Sistem Tanam Jajar Legowo (4:1). 6. Melakukan pengendalian HPT sesuai rekomendasi. 7. Penggunaan alat panen combine harvester.	* Mengikuti Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTB. * Mengikuti SOP Produksi benih Padi yang dilaksanakan oleh BRMP NTB.
42	BRMP Kalimantan Barat	Koperasi Segarau Bangun Tani	Koperasi	Jeruk	Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar	Bujangseta dan PTKJS	1. Pelatihan penguatan manajemen korporasi petani pada korporasi petani oleh BRMP Kalimantan Barat 2. Pelatihan penguatan manajemen UPJA dan operasional alsintan oleh BRMP Kalimantan Barat
43	BRMP Kalimantan Barat	Koperasi Sungai Kelambu Sejahtera	Koperasi Produsen	Padi	Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	- Standar Teknologi PTT Budidaya Padi - SNI padi Inbrida 6233:2015	1. Pelatihan Teknologi PTT Budidaya Padi 2. Pelatihan Operasional Mesin Tanam Padi (Rice Transplanter) 3. Sosialisasi Aplikasi Sakti Core

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
							System untuk mencatat transaksi masuk dan keluar 4. Manajem UPJA
44	BRMP Kalimantan Barat	Koperasi Tebas Gemilang Jaya	Koperasi Produsen	Padi	Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Teknologi PTT Budidaya Padi • Standar Produksi Beras 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Teknologi PTT Budidaya Padi 2. Pelatihan budidaya padi Sistem RAISA 3. Pelatihan Operasional Mesin Tanam Padi (Rise Transplanter) 4. Pelatihan perawatan dan troubleshooting Mesin Disedel 5. Pelatihan pembuatan perata (Leveller) pada pengolahan tanah budidaya padi 6. Pelatihan penggunaan pupuk hayati 7. Manajem UPJA
45	BRMP Kalimantan Barat	Koperasi Tebas Mekar Bersatu	Koperasi Produsen Tebas Mekar Bersatu	Padi	Desa Tebas Sungai, Kec. Tebas, Kab. Sambas	Teknologi budidaya tanaman padi dengan pendekatan PTT	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelatihan Penguatan Manajemen Koperasi Petani oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat 2) Pelatihan Penguatan Manajemen UPJA dan Operasional Alsintan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat 3) FGD Model Desa Mandiri Benih oleh Balai
46	BRMP Kalimantan Barat	Koperasi Sejiram Jaya Bersama	Koperasi	Jeruk	Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar	Produksi Benih Jeruk Bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan penguatan manajemen korporasi petani pada korporasi petani oleh BRMP Kalimantan Barat 2. Pelatihan penguatan manajemen UPJA dan operasional alsintan oleh BRMP Kalimantan Bara
47	BRMP Kalimantan Timur	KPB Sumber Makmur	Produsen Benih Bina Tanaman Pangan	Padi	Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Benih Terstandar 2. Standar Penggunaan Alat Tanam Benih Langsung (ATABELA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Perbenihan standar oleh tim Perbenihan dan UPT-PSB TPH Prov Kaltim 2. FGD Identifikasi Kebutuhan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tanaman Pangan

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
48	BRMP Kalimantan Timur	KPB Tani Maju	Produsen Benih Bina Tanaman Pangan	Padi	Samarinda Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Produksi Benih Terstandar	Bimbingan Teknis Perbenihan standar oleh tim Perbenihan dan UPT-PSB TPH Prov Kaltim
49	BRMP Kalimantan Timur	KPB Padat Karya	Produsen Benih Bina Tanaman Pangan	Padi	Anggana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Produksi Benih Terstandar	Bimbingan Teknis Perbenihan standar oleh tim Perbenihan dan UPT-PSB TPH Prov Kaltim
50	BRMP Kalimantan Timur	KPB Tani Maju	Produsen Benih Bina Tanaman Pangan	Padi	Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Produksi Benih Terstandar	Bimbingan Teknis Perbenihan standar oleh tim Perbenihan dan UPT-PSB TPH Prov Kaltim
51	BRMP Kalimantan Timur	CV Sinar Tani	CV	Padi	Tanjung Palas, Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Produksi Benih Terstandar	Bimbingan Teknis Perbenihan standar oleh tim Perbenihan BRMP Kaltim
52	BRMP Sulawesi Barat	Harapan Mulyo	Kelompok Tani	Padi	Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat	- SNI 6128:2020 - SNI 6729:2016 tentang Produksi Benih Padi - SNI 6729:2016 Benih Padi (Oryza sativa L.) - SNI 8163:2015 : Sistem Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Mengatur tata cara - SNI 7778:2021 tentang Padi Sawah (Oryza sativa L.) - Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Harvesting Practices (GHP)	Pendampingan
53	BRMP Sulawesi Barat	Padaelo	Kelompok Tani	Padi	Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat	SNI 6233:2015 tentang Benih Padi Inbrida	Pendampingan
54	BRMP Sulawesi Barat	Sinar Maros	Kelompok Tani	Padi	Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat	bimbingan teknis atau sosialisasi GAP (Good Agricultural Practice) padi sawah	Pendampingan
55	BRMP Sulawesi Tenggara	Koperasi Produsen LEM Sejahtera Kab. Kolaka Timur	Koperasi Petani	Kakao	Lambandia, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara	Permentan No 48 tahun 2014 tentang pedoman teknis budidaya kakao yang baik (GAP) (Pembangunan dan pengelolaan tempat pembibitan)	Pendampingan
56	BRMP Sulawesi Tenggara	Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera	Koperasi Petani	Sapi Potong	Aere, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara	SNI 3148-2:2024 tentang pakan konsentrat sapi potong	Pendampingan
57	BRMP Sulawesi Tengah	Pendampingan Penerapan GAP Cabai ke Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Program Gerakan Nasional Pengendalian	Lembaga Pemasyarakatan Lapas Palu Provinsi Sulawesi Tengah	Hortikultura (cabai)	Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi Prov. Sulteng	Good Agriculture Practices (GAP) Cabai	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kesesuaian lahan untuk komoditas cabai • Pelatihan Pembuatan Pupuk Kandang dan Biochart Sekam Padi

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
		Inflasi Pangan					
58	BRMP Sulawesi Selatan	UD. Harapan Tani	UD	Padi	Jl. Poros Pallangga, Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	SNI 6233:2015 (Benih Padi Inbrida)	Sosialisasi SNI 6233:2015, Pelatihan Audit Internal
59	BRMP Sulawesi Selatan	Koperasi Bawakaraeng Maju Bersama	Koperasi Petani	Kentang	Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab. Gowa	SNI 9227:2023 tentang produksi umbi kentang kelas benih sebar (G2)	Sosialisasi, bimbingan teknis tentang produksi benih kentang kelas G2 terstandar
60	BRMP Sulawesi Selatan	Koperasi Tonasa Sukses Mandiri	Koperasi Petani	Sapi Potong	Desa Tonasa, Kec. Tombolopao, Kab. Gowa	SNI 9316:2024 tentang benih rumput gajah	Sosialisasi, bimbingan teknis tentang pengolahan pakan sapi (rumput gajah)
61	BRMP Gorontalo	Koperasi Produsen Sukma Melati Hutabohu	Koperasi, Sesuai Kepmen Hukum dan HAM No: AHU-0003815. AH.01.29. TAHUN 2022	Pupuk Organik Padat	Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	SNI 7763:2018, SNI Pupuk Organik Padat	Pelatihan Penguatan Korporasi Petani dan Bisnis diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian pada November Tahun 2025 di Hotel Aston Gorontalo
62	BRMP Gorontalo	UMKM Helco Melati	NIB - 1275000320217	Kelapa	Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	SNI 8904 : 2020 tentang Minyak Goreng Kelapa dan SNI 3741 : 2013 tentang Minyak Goreng	Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
63	BRMP Gorontalo	UD Taat Karya	UD	Beras Medium dan Premium	Desa Bulotalangi, Kec Bolango Timur, Kab Bone Bolango, Gorontalo	SNI 6128:2020 Beras	Pelatihan penerapan Standar Beras dan Standar Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 yang diselenggarakan BRMP Gorontalo
64	BRMP Maluku	Usaha Baru	Poktan	Padi	Kilo 7, Makariki, Amahai, Maluku Tengah	SNI 8969:2021 tentang IndoGAP Tanaman Pangan; SNI 6233:2015: Benih Padi Inbrida	Bimtek IndoGAP; Bimtek Penanganan Pascapanen Padi
65	BRMP Maluku Utara	CV. Halmahera Agro Mandiri (HAGRI) - Penanganan Benih Padi	CV	Padi		- Sertifikat Standar Nomor: 1102251214360001 (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko), diterbitkan 11 Februari 2025. - Standar Good Agricultural Practices (GAP).	Budidaya Tanaman Padi Ter-standar
66	BRMP Maluku Utara	Budidaya dan Pasca panen Pala Organik	Pelaku Utama: Kelompok Tani (Poktan) Mirimoi; Pelaku Usaha: Koperasi Jasa Pengolahan	Pala	Desa Simau, Kec. Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara	Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik	Updating Data Untuk Inspeksi Internal di Lapangan secara Mandiri

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025
			Komoditi Perkebunan Dokono (Akta Notaris tahun 2023)				
67	BRMP Papua	Kelompok Tani Karya Makmur	Kelompok Tani	Perbenihan Padi	Distrik Skanto, Kab Keerom, Prov Papua	SNI 6233 : 2015	Pendampingan
68	BRMP Papua Barat	Koperasi AMIN	CV	Biji Kopi	Distrik Sururey, Kabupaten Pegunungan Arfak	SNI 01-2907-2008 Tentang Biji Kopi	Pengenalan SNI dan HACCP ; Pendampingan Penyusunan SOP Pasca Panen Biji Kopi
69	BRMP Penerapan	Koperasi Produksi Petani Berkah Sejahtera	Koperasi	Padi dan kelapa sawit	Desa Sungai Pangkalan I, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan benih bermutu 2. Pengolahan lahan terstandar 3. Penanaman presisi 4. Pemupukan berimbang dan tepat sasaran 5. Pengelolaan air irigasi efisien 6. Pengendalian OPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan benih bermutu 2. Pengolahan lahan terstandar 3. Penanaman presisi 4. Pemupukan berimbang dan tepat sasaran 5. Pengelolaan air irigasi efisien 6. Pengendalian OPT Peningkatan kapasitas perkoperasian dan 7. Manajemen kelembagaan Ekonomi Kawasan pertanian kepada Pengurus anggota dan penyuluh pendamping.

AGRO MODERN

Lampiran 11. Sebaran Penggunaan SBK pada Satker Lingkup BRMP 2025

No	Satuan Kerja	Jumlah RO	Jumlah RO SBKU	Jumlah RO SBKK
1	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	6	3	0
2	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	9	3	0
3	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	7	3	0
4	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	9	3	0
5	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	8	3	0
6	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	7	3	0
7	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	7	3	0
8	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	7	3	0
9	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	9	3	0
10	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	7	3	0
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	9	3	0
12	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	7	3	0
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	9	3	0
14	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal	9	3	0
15	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	7	3	0
16	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	16	8	0
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	7	3	0
18	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	9	3	0
19	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	6	3	0
20	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	3	0
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	8	3	0
22	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	7	3	0
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	10	3	0
24	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	8	3	0
25	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	9	3	0
26	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	7	3	0
27	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	7	3	0
28	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	7	3	0
29	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	8	3	0

No	Satuan Kerja	Jumlah RO	Jumlah RO SBKU	Jumlah RO SBKK
30	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	7	3	0
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	9	3	0
32	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	12	3	0
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	13	3	0
34	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	10	3	0
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	11	3	0
36	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	8	3	0
37	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	8	3	0
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	9	3	0
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	9	3	0
40	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	9	3	0
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	8	3	0
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	9	3	0
43	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	7	3	0
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	8	3	0
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	7	3	0
46	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	11	3	0
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	8	3	0
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	7	3	0
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	10	3	0
50	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	7	3	0
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	10	3	0
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	10	3	0
53	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	8	3	0
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	8	3	0
55	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	9	3	0
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	13	3	0
57	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	7	3	0
58	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	9	3	0
59	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	7	3	0
60	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	7	3	0
61	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	7	3	0

No	Satuan Kerja	Jumlah RO	Jumlah RO SBKU	Jumlah RO SBKK
62	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	8	3	0
63	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	7	3	0
64	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	7	3	0
Total		536	197	0



AGRO MODERN

Lampiran 12. Rekap Nilai Efisiensi Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK

No	Satuan Kerja	Efisiensi	
		Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	100	100
2	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	100	100
3	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	100	100
4	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	100	100
5	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	100	100
6	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	100	100
7	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	100	100
8	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	100	100
9	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	100	100
10	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	100	100
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	100	100
12	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	100	100
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	100	100
14	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	100	100
15	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	100	100
16	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	50	27,7
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	100	100
18	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	100	100
19	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	100	100
20	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	100	100
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	100	100
22	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	100	100
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	100	100
24	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	100	100
25	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	100	100
26	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	100	100
27	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	100	100
28	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	100	100
29	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	100	100
30	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	100	100
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	100	100
32	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	100	100
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	100	100
34	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	100	100
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	100	100
36	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	100	100
37	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	100	100
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	100	100

No	Satuan Kerja	Efisiensi	
		Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	100	100
40	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	100	100
	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	100	100
41		100	100
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	100	100
43	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	100	100
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	100	100
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	100	100
	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	100	100
46		100	100
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	100	100
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	100	100
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	100	100
50	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	100	100
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	100	100
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	100	100
	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	100	100
53		100	100
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	100	100
55	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	100	100
	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	100	100
56		100	100
	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	100	100
57		100	100
	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	100	100
58		100	100
59	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	100	100
	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	100	100
60		100	100
61	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	100	100
	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	100	100
62		100	100
63	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	100	100
64	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	100	100

AGRO MODERN

Lampiran 13. Rekap Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BRMP TA 2025 per tanggal 24 Januari 2026

No	Uraian Satker	Nilai IKPA
1	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	100
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	100
3	Balai Perakitan Dan Pengujian Lingkungan Pertanian	100
4	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	99,97
5	Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	99,79
6	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Jeruk Dan Buah Subtropika	99,70
7	Loka Perakitan Dan Pengujian Ruminansia Besar	99,21
8	Loka Perakitan Dan Pengujian Ruminansia Kecil	98,80
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	98,72
10	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	98,55
11	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	98,29
12	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Pemanis Dan Serat	98,26
13	Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Veteriner	98,25
14	Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Bioteknologi Dan Sumber Daya Genetik Pertanian	98,23
15	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	98,16
16	Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	98,08
17	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Sayuran	97,98
18	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Industri Dan Penyegar	97,79
19	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	97,74
20	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	97,74
21	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Hias	97,72
22	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik	97,46
23	Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	97,27
24	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	97,15
25	Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	97,14
26	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Palma	97,06
27	Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	96,87
28	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	96,86
29	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	96,27
30	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	96,18
31	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanah Dan Pupuk	96,13
32	Balai Perakitan Dan Pengujian Agroklimat Dan Hidrologi Pertanian	96,12
33	Balai Perakitan Dan Pengujian Unggas Dan Aneka Ternak	95,99
34	Balai Perakitan Dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	95,84
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	95,58
36	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	95,32

No	Uraian Satker	Nilai IKPA
37	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	95,26
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	95,10
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	95,09
40	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Serealia	95,03
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	94,95
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	94,89
43	Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	94,68
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	94,50
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	94,30
46	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	94,27
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	93,82
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	93,69
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	93,63
50	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	93,51
51	Loka Perakitan Dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	92,98
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	92,89
53	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	92,78
54	Pusat Perakitan Dan Modernisasi Peternakan Dan Kesehatan Hewan	92,74
55	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	92,56
56	Sekretariat Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	92,03
57	Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	91,95
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	91,78
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	90,27
60	Balai Besar Pengembangan Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	90,25
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	90,02
62	Balai Pengelola Hasil Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	89,70
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	89,50
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	89,49

AGRO MODERN